

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/364781606>

Ilmu Sosial Terapan Kajian Teoritis dan Studi Kasus

Chapter · October 2022

CITATIONS

0

READS

135

2 authors, including:



Ridfa Chairani

Bogor Agricultural University

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

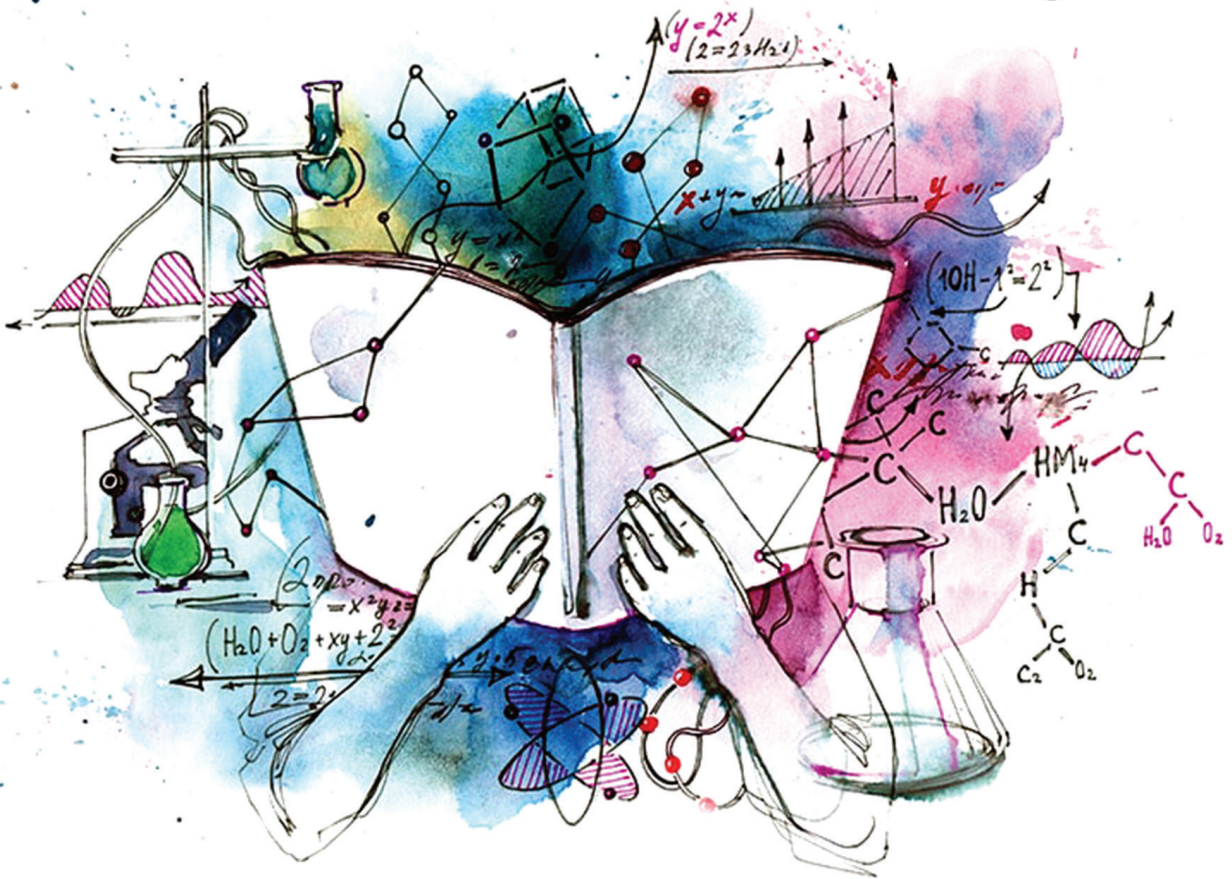
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Ilmu sosial terapan kajian teoritis dan studi kasus [View project](#)

Penyunting :
Andriansyah
Taufiqurokhman
Ismail Suardi Wekke

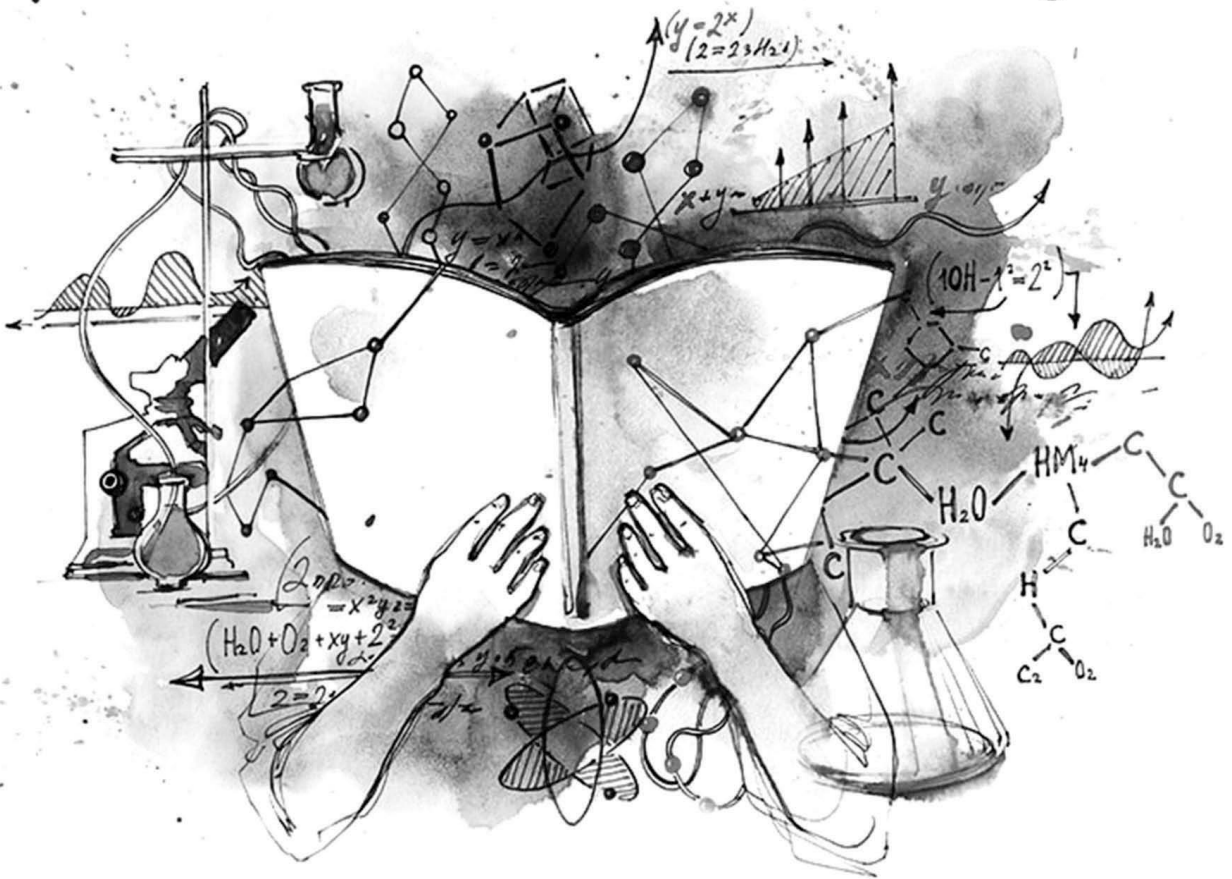
ILMU SOSIAL TERAPAN KAJIAN TEORITIS DAN STUDI KASUS



Penerbit :
Moestopo Publishing
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Penyunting :
Andriansyah
Taufiqurokhman
Ismail Suardi Wekke

ILMU SOSIAL TERAPAN KAJIAN TEORITIS DAN STUDI KASUS



Penerbit :
Moestopo Publishing
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG
DILARANG MENGUTIP ATAU
MEMPERBANYAK SEBAGIAN
ATAU KESELURUHAN ISI
BUKU TANPA IZIN DARI
PENERBIT

ILMU SOSIAL TERAPAN KAJIAN TEORITIS DAN STUDI KASUS

EDISI PERTAMA TAHUN 2022

Penyunting :

Andriansyah

Taufiqurokhman

Ismail Suardi Wekke

Penerbit :

Moestopo Publishing

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

No. ISBN :



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku 04, dengan Judul: **ILMU SOSIAL TERAPAN: KAJIAN TEORITIS DAN STUDI KASUS**, telah selesai. Atas nikmat Allah jualah sehingga buku ini bisa berada di tangan para pembaca. Hanya dengan izin dan maunahnya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Walau setelah sekian lama selangkah demi selangkah sehingga bisa menyelesaikan buku. Semuanya tak lain dan tak bukan, tentu karena anugerah dan lindungan Allah semata.

Buku ini dituliskan untuk menjadi referensi dalam kaitan dengan penelitian. Dimana salah satunya, penelitian tindakan kelas. Seiring dengan pengembangan kurikulum, dan juga kemampuan riset mahasiswa, maka pengayaan referensi penelitian diperlukan. Menjadi catatan-catatan yang dijadikan bagian dalam penyusunan buku ini.

Buku menjadi sebuah kesempatan untuk tetap belajar. Pada saat yang sama juga merupakan perjalanan “spiritual” bagi menempa diri. Olehnya, buku ini sejatinya adalah wujud dalam menjalani sebuah “ritual” yang pada akhirnya menemukan bentuk dalam bagian-bagian yang pada akhirnya disebut “buku”. Walau tak pernah mudah, namun kebersamaan dan juga kesempatan yang ada dalam suasana kekhawatiran dan juga kecemasan, mengiringi proses penulisanya.

Ketika bergabung empat kampus di jajaran LLDikti Wilayah III, kita memulai mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi. Diantaranya juga Konsorsium Ilmu Sosial Terapan. Dari situ, kemudian menjadi bagian dalam memulai mencatatat bahan referensi yang dapat dijadikan sebagai diskusi proses membangun pengalaman belajar. Kelas tidak saja menjadi ruang untuk belajar bersama. Pada saat yang sama, kelas juga menjadi laboratorium dalam memulai sebuah

diseminasi ilmu pengetahuan. Dosen bukan saja menjadi fasilitator dalam belajar, tetapi bahkan turut dalam proses belajar itu sendiri.

Pada kesempatan berikutnya, dengan kerjasama empat perguruan tinggi menjadi sebuah pelajaran. Sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi adalah “mantra” kolaborasi. Ini juga yang menguatkan tema buku ini. Sehingga kemudian dinamakan dengan pendekatan kolaboratif.

Selanjutnya, pada masa-masa pagebluk covid-19. Kerap berkomunikasi dengan saudara Herianto. Akhirnya, dengan komunikasi tersebut yang kemudian melahirkan buku ini. Dimulai dengan catatan awal, kemudian dielaborasi oleh para penulis. Terakhir mendapatkan bentuk penerbitan ketika direview bersama.

Ringkasnya, buku ini merupakan sebuah evolusi. Berjalan dari tahun ke tahun, dan pada akhirnya dapat berwujud menjadi sebuah buku. Walau pada akhirnya kemudian dapat juga dicetak. Sekalipun awalnya dibuat dengan sangat sederhana. Bahkan diterbitkan dalam bentuk buku elektronik. Untuk sampai di tangan pembaca, banyak orang yang terlibat dan membantu. Pada semuanya, kami bertiga menyampaikan terima kasih. Keempat institusi tempat kami bernaung, masing-masing memberikan dukungan dalam mendorong hadirnya publikasi dosen.

Tempat yang berjauhan, walau dalam satu kota, bukanlah merupakan kendala. Terlebih lagi, dalam suasana pandemi yang kemudian memberikan peluang untuk belajar dengan pelbagai gawai. Inilah yang kemudian hadir dalam bentuk komunikasi dengan media teknologi informasi. Kini, jarak bukan lagi sebuah masalah. Justru dengan berada di rumah masing-masing, memberikan kesempatan menyelesaikan buku ini. Setelah sekian lama, hanya menjadi file-file di masing-masing komputer para dosen. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada kolega di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang memberikan ruang-ruang diskusi sehingga buku ini bisa wujud pada akhirnya. Dengan tantangan dan kendala yang mengiringinya selama ini.

Kehadiran buku ini, pastinya selalu ada kelemahan dan kekeliruan. Untuk itu, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya tegur sapa dan urung

saran dari para pembaca. Untuk itu, kami senantiasa menantikan saran perbaikan untuk kemudian menuju pada kesempurnaan karya. Pada Allah SWT jualah kami kembalikan segala ikhtiar ini untuk mendapatkan bimbingan, sehingga perbaikan demi perbaikan dapat dilaksanakan pada penerbitan selanjutnya.

Jakarta, 11 November 2021

Andriansyah
Taufiqurokhman
Ismail Suardi Wekke

DAFTAR ISI

	Hal
1 Modal Sosial, Kinerja Koperasi & Pembangunan Ekonomi <i>Oleh: Cahyo Hatta Murtyoso</i> INSTITUT PEMERINTAHAN Dalam Negeri	1-4
2 Pengaruh Kualitas Produk dan Inovasi Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah (Studi kasus pada Mahasiswi di Kota Bekasi) <i>Aramia Fahriyah, Ridfa Chairani, Trie Andari Ratna Widyastuti, Wardatun Soleha</i> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I	5-7
3 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING JAKARTA UTARA <i>Agus Setia Budi</i> ¹ <i>Khikmatul Islah</i> ² Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I	8-13
4 ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PADA KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA PELAYANAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS) <i>Diana Prihadini</i> ¹ , <i>Krishantoro</i> ² , <i>Sri Susanti</i> ³ , <i>Sulistiarini</i> ⁴ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I Jakarta, Indonesia 10530	14-26
5 Analisis Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia <i>Izzatusholekha, Harist Kholilurrohman, Rahmat Salam</i> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta <i>izzatusholekha@umj.ac.id</i>	27-48
6 Dampak Kebijakan Pengembangan Moeslim Friendly Tourism dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kabupaten Lombok Barat) <i>Angga Sulaiman</i> ¹ ; <i>Aditya Prasetyo</i> ² Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional <i>1,2</i>	49-67
7 MAKNA KOMUNIKASI DALAM PERKULIAHAN NON TATAP MUKA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL WHATSAPP <i>Yunita Sari, Mediana Handayani</i> Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	68-84
8 Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di SMK Negeri 20 Jakarta pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Aberar Guridno</i> ¹ ; <i>Angga Sulaiman</i> ² ; <i>Shalilha</i> ³ Public Administration, Faculty of Social Science and Politic, Universitas Nasional <i>1,2</i>	85-98
9 Pengaruh Efektivitas Aplikasi “Kemboja Sari” terhadap Kualitas Pelayanan di Kota Sukabumi <i>Ahmad Muksin</i> ¹ ; <i>Larisa Putri A. Rahman</i> ² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Universitas Nasional	99-116

MODAL SOSIAL, KINERJA KOPERASI & PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh: Cahyo Hatta Murtyoso INSTITUT PEMERINTAHAN Dalam Negeri

PENDAHULUAN

Kesenjangan Ekonomi yang sangat tinggi

- Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia, sejak Orde Baru adalah: Pertumbuhan Ekonomi disertai Pemerataan
- Sejak tahun 1980 hingga tahun 2021, pemerataan tidak terjadi.
- Angka Gini Rasio : 0,38 (BPS, 20021) Kesenjangan ekonomi sangat tinggi.
- Bukti kesenjangan ekonomi yang lain adalah kondisi UMKM 2018
 - Usaha Mikro sekitar 63 juta unit usaha (lebih dari 98%)
 - Usaha Kecil sekitar 780 ribu unit usaha (kurang dari 2 %)
 - Usaha Menengah sekitar 60 ribu unit usaha (kurang dari 1 %)
 - Data tersebut menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi

KRITIK

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN

- Hanya fokus kepada variabel ekonomi dan mengabaikan faktor sosial budaya
- Akibatnya selalu muncul fenomena kesenjangan ekonomi dan sulit untuk diatasi
- Penyebabnya: suatu kegiatan ekonomi tertanam dalam struktur sosial, di mana ada nilai-nilai sosial-budaya yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi

MUNCUL GAGASAN MODAL SOSIAL

- Tahun 1990 muncul aliran baru dalam pembangunan ekonomi.
- Konsep Modal Sosial secara eksplisit mampu menjelaskan pengaruh nilai-nilai sosial-budaya dalam perilaku ekonomi.
- Faktor institusi sangat penting dalam konsep modal social.
- Modal sosial berfungsi memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan.
- Agar efektif dibutuhkan lembaga kerjasama sebagai instrumen untuk memandu kerjasama yang saling menguntungkan.
- Lembaga kerjasama tersebut adalah koperasi (Lembaga ekonomi berbasis modal sosial).

TEORI MODAL SOSIAL

- Diperkenalkan pertama kali oleh Lyda Judson Hanifan tahun 1916.
- Tahun 1980 dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu.
- Tahun 1988, James Coleman menyatakan bahwa modal sosial sebagai suatu tindakan sosial dilihat dari perspektif sosiologi dan ekonomi.
- Tahun 1993 dikembangkan oleh Putnam (jaringan, norma, kepercayaan).
- Tahun 2002, Carl menyatakan bahwa bukan sumberdaya yang dimiliki individu atau kelompok, namun merupakan proses sosial yang mengarah kepada hasil yang produktif.
- Kelompok sosial dan pengaturan sosial memiliki kepentingan untuk menghasilkan produk yang menguntungkan individu secara bersama-sama.

TEORI KOPERASI

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orangan atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus merupakan Gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azaz kekeluargaan (UU No. 25 th. 1992).
- Ciri-ciri Koperasi : (1) Keanggotaan Koperasi terbuka, (2) Pengelolaan secara demokratis, (3) Berkeadilan dan berjiwa kekeluargaan, (4) Otonom dan mandiri.

MODAL SOSIAL DAN PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI

- Masyarakat koperasi bersifat demokratis, setiap anggota memiliki kesempatan yang untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan koperasi.
- Kegiatan tersebut meliputi :
 - Partisipasi dalam menanamkan saham pada koperasi.
 - Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
 - Partisipasi dalam control terhadap tata kelola koperasi.

MODAL SOSIAL DAN KINERJA KOPERASI

- Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja atas pelaksanaan tugas tertentu (Payaman Simanjutak, 2005).
- Kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian hasil; dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
- Kinerja koperasi merupakan hasil kerja koperasi dalam mewujudkan peningkatan perekonomian para anggota.
- Liang (2015) membuktikan secara empiris di Zhejiang, China, bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi.

KOPERASI PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI

- Koperasi merupakan alternatif bagi perusahaan swasta dalam memberikan pelayanan kepada para petani dipedesaan maupun kepada para pengusaha UMKM.
- Pelayanan tersebut meliputi: (1) pemasaran produk petani/UMKM, (2) permodalan bagi usaha pertanian dan UMKM, (3) bahan baku (bibit dan pupuk) bagi para petani dan UMKM.
- Kelebihan koperasi dibandingkan perusahaan swasta adalah koperasi merupakan Lembaga ekonomi dengan prinsip kemanusiaan sehingga tidak mencari keuntungan berlebih, sehingga lebih berdaya saing dibandingkan perusahaan swasta.
- Maka koperasi memiliki pengaruh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih adil. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Morris tahun 2015.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Modal sosial terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi (Liang, 2015) dan Koperasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih adil (Morris, 2015).
- Dibutuhkan partisipasi anggota dalam kontrol terhadap tata kelola koperasi, kegagalan koperasi ditengarai oleh rendahnya control para anggota.
- Peningkatan partisipasi anggota dapat ditingkatkan melalui Pendidikan dan pelatihan tentang koperasi bagi para anggota dan pengurus koperasi.
- Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dibutuhkan tumbuh suburnya koperasi-koperasi bagi para petani dan bagi pengusaha UMKM.

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK WARDAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWI DI KOTA BEKASI)

*Aramia Fahriyah, Ridfa Chairani, Trie Andari Ratna Widyastuti, Wardatun Soleha
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI*

LATAR BELAKANG

1. Keputusan pembelian konsumen menjadi faktor yang penting untuk penentu eksistensi suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat terus dikatakan eksis jika konsumen yang memutuskan melakukan pembelian produk dari suatu perusahaan mendapat respon positif dari konsumen tersebut.
2. Dalam sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan tidak luput dari kualitas produk. Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan yang menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar.
3. Fenomena kualitas produk dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian dalam membeli skincare atau makeup, terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjual skincare dan makeup yang bagus dan berkualitas atau sesuai dengan keinginan para pelanggan.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas produk dan inovasi terhadap keputusan produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode ilmiah scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis.
2. Teknik pengumpulan data dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan sampel random atau sampel acak, pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama, dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Berdasarkan angka yang diperoleh pada variabel kualitas produk tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel kualitas produk maka akan diikuti peningkatan pada keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi.

1. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Hasil ini menunjukkan variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi.
2. Pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian, inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Hasil ini menunjukkan variabel inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada

mahasiswi di Kota Bekasi.

3. Pengaruh kualitas produk dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian, kualitas produk dan inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Hasil ini menunjukkan variabel kualitas produk dan inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas produk dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian, maka kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Hasil uji koefisien 5 determinasi (R^2) sebesar 72,8% sisa sebesar 27,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Inovasi produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 65,4% sisa sebesar 34,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Kualitas produk dan inovasi produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi di Kota Bekasi. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 75,5% sisa sebesar 24,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran, diharapkan penelitian yang akan datang bisa menggunakan parameter lain yang relevan terhadap keputusan pembelian.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING JAKARTA UTARA

Agus Setia Budi¹ Khikmatul Islah²

*Fakultas Ilmu Administrasi Institut STIAM I
1 agsbicuy@gmail.com 2 islahzone@gmail.com*

PENDAHULUAN

1. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu harapan masyarakat yaitu terselenggaranya pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tuntutan dilakukan oleh masyarakat atas perkembangan zaman di era globalisasi agar terbentuk good governance yang akan meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang sangat mempengaruhi variabel pelaksanaan pelayanan publik.
3. Dalam masyarakat modern pelayanan publik akan selalu menjadi masalah utama.
4. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara Jakarta adalah salah satu organisasi publik yang merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pengujian kelaikan kendaraan bermotor di Jakarta utara dan memiliki Visi “Menjadikan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Profesional, Independent dan Melayani Publik dengan Ramah dan Senyum, berbasis SDM yang Memiliki Integritas Mengedepankan Inovasi Teknologi IT Untuk Menegakan Keselamatan Lalu

Lintas Angkutan Jalan dan Kelestarian Lingkungan” (Sumber Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing).

5. Unit ini merupakan salah satu Unit yang memiliki peran penting di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tanpa adanya Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing maka akan sulit untuk menegaskan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kelestarian Lingkungan. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan akan selalu menjadi sorotan masyarakat terutama pengguna pelayanan.
6. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing merupakan salah satu pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada publik atau masyarakat. Pada perkembangan saat ini alat transportasi darat mencapai jumlah titik yang tinggi atau dapat dikatakan meningkat, untuk itu pengujian kendaraan bermotor semakin dibutuhkan pengguna kendaraan untuk menjamin agar setiap kendaraan itu benar-benar layak jalan sesuai peraturan kelayakan kendaraan bermotor.
7. Seperti misalnya pengujian angkutan umum Bus, Mobil Barang dan Angkutan Kota yang ditujukan agar pengguna angkutan umum merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga dapat menarik jumlah pengguna angkutan umum dapat meningkat dari sebelumnya.
8. Sesuai peraturan menteri perhubungan RI nomor 156 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, pengujian kendaraan yang dilakukan oleh ASN haruslah memiliki kompetensi yang telah diatur, yang terdiri dari pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat satu, penguji tingkat dua, penguji tingkat tiga, penguji tingkat empat, penguji tingkat lima, dan master penguji. Pada dasarnya, seluruh penguji harus memiliki kompetensi yang selalu berkembang sehingga dapat meningkatkan kemampuan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan.
9. Sesuai peraturan menteri perhubungan RI nomor 156 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, Uji kelayakan kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus

dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Uji kelayakan berkala kendaraan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

10. Sesuai observasi penulis dilokasi penelitian, Pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor oleh pelaksana pelayanan pengujian kendaraan angkutan umum belum memuaskan masyarakat sehingga masih banyak terdapat keluhan yang dialami oleh masyarakat.
11. Adapun masalah yang terjadi dalam kaitannya dengan pelayanan pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum yaitu pemahaman masyarakat terhadap pelayanan pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum nampaknya belum semuanya mengerti dan memahami secara prosedur karena prosedur pelayanan masih berbelit-belit.

METODE

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.
2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Christianto, ATD., MT sebagai Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara;
 - b. Ir. Budi Sugiantoro, MAP sebagai Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara;
 - c. Bangkit Prakoso, A.Ma.PKB., ST sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara;
 - d. Masril, ST., MAP sebagai Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara;
 - e. Dwi Prayogo, A.Ma.PKB sebagai Penguji Kendaraan Bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara;

- f. Aldi Permana Wijaya, A.Md sebagai Staf di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara;
- g. Dwi Agustina, S.IP., MPA sebagai Akademisi Kampus Institut STIAM I Jakarta;
- h. Masyarakat Pengguna Layanan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara sebanyak 10 Orang.

HASIL DISKUSI

1. Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kualitas pelayanan publik di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara dapat dinilai dari lima dimensi yaitu:
 - b. Dimensi Tangibel (Bukti Fisik) yang mempunyai nilai indikator baik, hanya indikator kebersihan saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki.
 - c. Dimensi Reliability (Kehandalan) yang mempunyai nilai indikator baik, hanya indikator kecepatan dan kesiapan petugas yang perlu ditingkatkan karena ada yang berpendapat petugas lambat dalam melakukan proses pelayanan.
 - d. Dimensi Responsiviness (Ketanggapan) yang mempunyai nilai indikator sangat baik, terbukti dari tidak ada keluhan dari pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi Responsiviness.
 - e. Dimensi Assurance (Jaminan) yang mempunyai nilai indikator sangat baik, terbukti dari tidak adanya keluhan dari pengguna layanan terkait indikator dalam dimensi Assurance.
 - f. Dimensi Emphaty (Empati) yang mempunyai nilai indikator baik, namun ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu mengenai pemeriksaan kendaraan tanpa ijin terlebih dahulu ke pengguna pelayanan, ada yang merasakan ketidakpuasan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara adalah:

- a. Masih kurangnya jumlah lajur pengujian yang sekarang berjumlah 3 jalur untuk menjadi 4 jalur agar antrian pengujian dapat dipangkas dan pelayanan pun bisa lebih maksimal.
 - b. Sumber daya manusia yang jumlahnya kurang dan tidak kompeten, proses pelayanan yang membutuhkan waktu lama.
 - c. Kebersihan lajur pengujian yang kurang bersih sehingga berbahaya untuk petugas dan pengguna layanan.
 - d. Kurangnya sopan santun petugas khususnya penguji kendaraan.
3. Solusi dari penghambat pelaksanaan pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara adalah:
- a. Penyusunan RAB untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dan berapa saja biayanya untuk membangun 1 lajur mekanis lagi dan akan dimasukkan ke rencana APBD tahun 2021 sehingga tahun 2021 antrian panjang pelayanan dapat dipangkas.
 - b. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing dapat memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM.
 - c. Pimpinan unit pengelola pengujian kendaraan bermotor dapat memerintahkan cleaning service untuk melakukan kerja bakti setiap satu minggu sekali di area lajur mekanis, dan menugaskan cleaning service yang diposisikan disana untuk lebih giat membersihkan setiap harinya.
 - d. Mempermudah akses untuk memberikan laporan atau pengaduan untuk memudahkan pimpinan memonitoring bawahannya.

KESIMPULAN

1. Kualitas pelayanan publik di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara dapat dinilai baik berdasarkan lima dimensi, yaitu dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance, dan dimensi empathy. Hanya saja ada yang perlu diperbaiki terkait kebersihan, kecepatan dan kesiapan petugas, dan pemeriksaan kendaraan tanpa ijin terlebih dahulu.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara adalah terkait jumlah lajur pengujian, SDM, kebersihan dan kesopanan petugas.
3. Solusi dari penghambat pelaksanaan pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara adalah terkait menyesuaikan pada penyusunan RAB, adanya pelatihan bagi SDM, perlu adanya peningkatan kebersihan melalui cleaning service dan kemudahan akses.

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PADA KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA PELAYANAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS)

Diana Prihadini¹, Krishantoro², Sri Susanti³, Sulistiarini⁴

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Jakarta, Indonesia 10530

Email : dianahantoro@yahoo.com, krishantoro69@gmail.com,
srisusanti3680@gmail.com, sulis.tiarini85@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah yang terjadi masih terdapat Penerapan *Good Governance* yang belum maksimal jika dilihat dari Rekapitulasi Jumlah Surat Pernyataan Ahli Waris Tahun 2018, 2019 dan 2020 Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang setiap tahunnya masih terdapat surat pernyataan ahli waris ditolak karena masih terdapatnya kekurangan salah satu pernyataan dari surat pernyataan ahli waris. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris) terbilang belum maksimal, jika dilihat dari akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan aturan hukum. Kendala Penerapan *Good Governance* pada pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan masih adanya masyarakat yang

belum paham persyaratan dan tidak lengkap dokumen, kurangnya pemahaman dari pegawai dan kurangnya koordinasi yang terjalin antara masyarakat dan pegawai. Solusi mengatasi kendala berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pembuatan surat pernyataan ahli waris, Ada dasar hukum yang jelas untuk pelayanan surat pernyataan ahli waris untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pelayanan

1. PENDAHULUAN

Good Governance merupakan suatu harapan dari masyarakat, sejak zaman orde baru. *Good Governance* menjadi salah satu tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat disaat reformasi didengung – dengungkan, hal ini timbul karena ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah yang ada dan menjabat pada masa itu, sistem pemerintahan yang tidak transparan dan tidak berorientasi pada masyarakat, dengan munculnya semangat reformasi yang menciptakan iklim baik bagi sistem pemerintahan di Indonesia yang sangat dirindukan oleh masyarakat adanya perubahan yang signifikan.

Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik di era reformasi dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik itu adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan harus direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Good Governance adalah dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Pelayanan publik merupakan suatu upaya pemerintahan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan kinerja agar tercipta *Good Governance* dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam pembuatan yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan khususnya pembuatan surat pernyataan ahli waris.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa pelayanan publik Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi pada pelayanan kependudukan dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris tahun 2019 belum efektif meliputi : masih adanya penolakan atas surat pernyataan ahli waris dikarenakan keterbatasan pemberkasan masyarakat yang masih memiliki banyak kekurangan dari persyaratan, kurangnya sumber daya manusia sebagai pelayanan publik dan pelayanan yang kurang prima pada frontliner disebabkan standar operasional prosedur yang masih belum berjalan sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan yang ada di pelayanan publik. Terlihat pelayanan masyarakat dianggap kurang dari segi waktu penyelesaian dan penolakan atas permohonan surat waris.

Terlihat pelayanan masyarakat dianggap kurang dari segi waktupenyelesaian dan penolakan atas permohonan surat waris. Hal tersebut di atas dibuktikan dengan tabel rekapitulasi jumlah surat pernyataan ahli waris yang sudah masuk dan sudah diregistrasi oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Surat Pernyataan Ahli Waris Tahun 2018, 2019 dan 2020
Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

NO	TAHUN	Jumlah Surat Masuk	Jumlah Surat Disetujui	Jumlah Surat Tolak
1	2018	448	432	16
2	2019	457	444	13
3	2020	636	615	21
4	Total	1.541	1.507	50

Sumber : Bagian Seksi Pemerintahan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah surat tolak dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 sebanyak 50 surat dari total jumlah yang disetujui sebanyak 1.507 surat yang disetujui. Dari 3 tahun terakhir jumlah surat pernyataan ahli waris mengalami penambahan jumlah pemohon dengantingkat jumlah surat tolak dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Jumlah surat masuk dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 1.541 surat masuk. Penolakan pada surat masuk masih terdapatnya kekurangan salahsatu pernyataan dari surat pernyataan ahli waris.

Maka dari itu, berdasarkan dengan uraian yang diatas, Penulis berminat untuk meneliti tentang : **“Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris)”**.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:1) menerangkan :

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generasi”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*). Kecenderungan dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan dan mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana

pelaksanaannya, dan apakah hasilnya.

Menurut Sugiyono (2016:241) mengatakan bahwa :

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.”

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini, yaitu :

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:317) menerangkan bahwa :

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam”.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pihak pemerintahan, akademisi dan masyarakat secara tatap muka. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai Analisis penerapan Good Governance .

2) Observasi

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2016:310) menyatakan bahwa :

“Through observation, the researcher learn behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam melakukan observasi, peneliti akan terlibat kegiatan sehari-hari proses kerja dan orang yang diamati sebagai sumber data penelitian.”

Dalam teknik ini penulis melakukan pengumpulan data melakukan penelitian langsung ke Kantor Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) menerangkan bahwa :

“Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan kegiatan dokumentasi saat melaksanakan wawancara dan observasi untuk pelengkap data. Informan dalam

penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar paham dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam masalah penelitian.

Menurut Sugiyono (2017: 239) menyatakan bahwa :

“Teknik analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.”

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kegiatan analisis ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:412) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 46 konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris)

Penerapan *Good Corporate Governance* di tiap wilayah sangatlah berbeda-beda. Penerapan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana kantor Kecamatan Jatiasih dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* yang biasa dijadikan patokan dalam menilai baik buruknya tata kelola pemerintahan tersebut. Kantor Kecamatan Jatiaish yang menjadi objek penelitian saat ini merupakan wilayah yang berkembang diantaranya di sektor publik, sektor perkantoran, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Banyak faktor-faktor yang membuat penerapan *Good Governance* diantara lainnya :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Demokrasi
4. Aturan Hukum

Bertitik tolak pada uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga keseimbangan sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain Pemerintah dan Masyarakat. Karena itu, untuk membangun *Good Governance* dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* yang dimaksudkan diantara stakeholders didalam lokalitas. *Partnership* yang dimaksudkan disini adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, kemandirian untuk mencapai tujuan bersama. Dimana, pihak Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif) tidak dapat lagi menerapkan model kepemimpinan yang mengansumsikan stakeholders lain sebagai pengikut pasif yang akan menerima setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sebaliknya, pihak pemerintahan harus lebih dekat dengan warga dan secara inklusif melibatkan warga, baik dari sektor swasta maupun civil society, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok tua maupun muda.

Penerapan *Good Governance* dapat dinilai dari dimensi-dimensi penerapan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga "stakeholders". Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Pendirian Kantor Kecamatan Jatiasih dalam pelayanan publik salah satunya pada pelayanan pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bekasi menciptakan Penerapan *Good Governance* agar Kantor Kecamatan Jatiasih memberikan contoh yang baik. Pada pelayanan dilakukan berdasarkan pada SOP yang dilayani pada loket pelayanan satu pintu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris .

Kantor Kecamatan Jatiasih dalam akuntabilitas kebijakan dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris dapat menciptakan regulasi-regulasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Selain itu, dalam sistem penyelenggaraan pelayanan masih didominasi atas syarat yang harus dipenuhi, penyimpangan yang paling mempengaruhi proses pembuatan surat terdapat pada berkas masyarakat itu sendiri yang belum terpenuhi yang mengakibatkan proses surat terkesan lama.

Hal ini membuat etnisitas berdampak langsung juga pada berjalannya prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Kecamatan Jatiasih masih ada beberapa masyarakat yang ditolak proses surat masuk dikarenakan adanya persyaratan administrasi yang kurang.

b. Transparansi

Pelayanan publik di Kantor Kelurahan Jatiasih sudah menerapkan dimensi Transparansi berserta indikatornya yaitu ketepatan waktu dan biaya. Penilaian penerapan *Good Governance* yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara lain pegawai memberikan transparansi tepat waktu dalam pelayanan, pegawai memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, petugas memberikan transparansi kepastian biaya dalam pelayanan. Transparansi yang diberikan penyedia layanan berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan yang memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pengguna layanan, sifat dipercaya yang dimiliki para pegawai. Jika pengguna layanan sudah diberikan transparansi terkait pelayanan, maka akan menumbuhkan kepercayaan pengguna layanan penyedia layanan.

Transparansi dari Kecamatan Jatiasih selama ini untuk melakukan tugasnya sudah semakin membaik. Namun yang menjadi masalah ditengah masyarakat adalah sarana dan prasarana pendukung untuk menyebarluaskan informasi masih kurang (belum ada). Disamping itu, cenderung masih ada pihak-pihak yang menggunakan hak sebagai pejabat penentu dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pada pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris. Namun dari sisi pelayanan publik Kecamatan Jatiasih sudah menerapkan Pelayanan Adminduk Tanpa Biaya yang sudah ditempat di ruang pelayanan. Inovasi yang ditemukan ini perlu ada perubahan untuk lebih baik lagi demi kepentingan masyarakat.

c. Demokrasi

Dalam penerapan *Good Governance* menjalankan pemerintahan yang berjalan dengan baik di Kecamatan Jatiasih tidak terlepas dari pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demokrasi pada Kecamatan Jatiasih dalam pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris selalu berprinsip kepada keterbukaan, mengandalkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan, menjalankan pemerintahan yang adil, mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat dalam setiap kebijakan, mengutamakan musyawarah dalam menjalankan pemerintahan. Dalam upaya penerapan *Good Governance* mempunyai tanggungjawab yang besar dalam membina warga masyarakatnya menuju pemerintahan yang baik dan menciptakan suasana kerja yang baik secara demokratis membuat secara terbuka demi kepentingan bersama.

d. Aturan Hukum

Merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan, dengan penyampaian informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pengguna layanan dengan baik dan cepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada proses pembuatan surat pernyataan ahli waris. Pelayanan publik

di Kantor Kelurahan Jatiasih sudah menerapkan beserta indikatornya kesigapan dan sanksi pembuatan surat. Penilaian kualitas pelayanan yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara lain merespon setiap pemohon surat pernyataan ahli waris yang ingin mendapatkan pelayanan, pegawai melakukan pelayanan dengan cepat, pegawai melakukan pelayanan dengan tepat, pegawai memberikan pelayanan dengan cermat, pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan semua keluhan pengguna layanan direspon oleh pegawai layanan. Namun sanksi bagi masyarakat yang belum memiliki surat pernyataan ahli waris belum ada.

Kendala Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris)

Dalam proses pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, masih terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala proses Penerapan *Good Governance*, diantaranya masih adanya masyarakat yang belum paham persyaratan dan tidak lengkap dokumen, kurangnya pemahaman dari pegawai dan kurangnya koordinasi yang terjalin antara masyarakat dan pegawai.

Solusi Permasalahan Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris)

Solusi dalam mendorong terwujudnya pelaksanaan yang berkualitas di kantor Kantor Kecamatan Jatiasih adalah

- a. Sosialisasi kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan ahli waris
- b. Ada dasar hukum yang jelas untuk pelayanan surat pernyataan ahli waris
- c. Ada nya dinas atau lembaga terkait pada pelayanan surat waris

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti dan pengolahan data pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris)” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris) masih terbilang belum maksimal, jika dilihat dari faktor akuntabilitas, trensparansi, demokrasi dan aturan hukum. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh Kantor Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Rekapitulasi Jumlah Surat Pernyataan Ahli Waris Tahun 2018, 2019 dan 2020 Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang setiap tahunnya masih terdapat surat pernyataan ahli waris ditolak karena masih terdapatnya kekurangan salah satu pernyataan dari surat pernyataan ahli waris.
2. Kendala Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris) masih adanya masyarakat yang belum paham persyaratan dan tidak lengkap dokumen, kurangnya pemahaman dari pegawai dan kurangnya koordinasi yang terjallin antara masyarakat dan pegawai sehingga penerapan *Good Governance* tidak berjalan.
3. Solusi mengatasi kendala Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris) adalah :
 - a. Sosialisasi kelengkapan persyaratan permohonan pernyataan ahli waris
 - b. Ada dasar hukum yang jelas untuk pelayanan surat pernyataan ahli waris
 - c. Ada nya dinas atau lembaga terkait pada pelayanan surat waris

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin Widjaja Tunggal. 2012. *Internal Auditing*, Edisi Lima. Yogyakarta: BPFE.

Arief Effendi. 2016. *The Power of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung : CV Pustaka.

Hardiansyah. 2017. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.

HA Abdullah. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 2 (2)*, 188-200, 2019. 2019.

Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta.

Kriyantono, Rachmat. 2015. *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan*.

Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance*. Solo: PT Era Adicitra Intemedia.

Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal

Arif Cahyadi. 2016. *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)*. (Jurnal Penelitian Administrasi Publik e-ISSN: 2460-1586. Oktober 2016, Vol. 2 No. 2, hal. 479 - 494).

Nur Aini. 2019. *Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance*. (Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume 1 Nomor 1, 2019).

Reinaldi Gisberd, Femmy Tulus dan Jhonny Kalangi. 2016. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara*. (Jurnal Thesis Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 1 No. 43, 2016).

Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono. 2014. *Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3 Nomor 1, 2014, ISSN: 2442-6262)

ANALISIS KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Izzatusholekha, Harist Kholilurrohman, Rahmat Salam
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Jakarta
izzatusholekha@umj.ac.id

ABSTRAK

Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rata-rata harian, pola curah hujan, tingginya permukaan laut dan variabilitas iklim, tentunya perubahan ini memberikan dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia. Perubahan iklim yang terjadi juga disebabkan beragam aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Secara alamiah, gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari yang sumber penghasil gas rumah kaca seperti penggunaan energi listrik, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, juga membakar sampah secara keseluruhan hal itu akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Maka Indonesia sebagai negara yang padat penduduk dan padat aktivitas berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca, dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pendukung. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan/*Library Research*, dan menggunakan teori kebijakan publik sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui analisa kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah menjabarkan kebijakan publik yang mendukung upaya penurunan emisi GRK mulai dari Kebijakan dari tingkat Internasional, Nasional bahkan sampai ke

tingkat daerah, Kebijakan Rencana Aksi Nasional GRK yang diimplementasikan akan berdampak pada penurunan emisi GRK, seperti menerapkannya kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan kebijakan pengendalian limbah, dalam penelitian ini kebijakan yang baik terhadap keberlangsungan dan aksi penyelamatan lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut juga sebagai salah satu langkah dalam menurunkan emisi GRK yang dapat merusak atau mencemari lingkungan.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Penurunan Emisi GRK, Pembangunan

LATAR BELAKANG

Isu lingkungan hidup terutama perubahan iklim sampai saat ini masih terus menjadi isu global. Adanya perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi secara global, kemampuan bumi untuk menopang peradaban manusia semakin berkurang, dan naiknya suhu planet beberapa dekade terakhir menjadi bukti bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja.¹ kondisi iklim yang semakin mengancam lingkungan hidup semakin nyata dirasakan. Hal ini di buktikan oleh riset Organisasi Meteorologi Dunia / *World Meteorological Organization* (WMO) dalam perhelatan *Conference of Parties COP25* menyebut tahun 2019 sebagai salah satu tahun terpanas sepanjang dekade karena telah terjadinya kenaikan suhu global ditahun 2019 sebesar 1,1 derajat celcius. Menurut para ahli hal itu disebabkan oleh produksi karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas rumah kaca lainnya secara berlebihan pada ranah industri². Dampak industri yang paling nyata yaitu terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh pencemaran udara itu sendiri. Dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca sudah mulai dirasakan dibeberapa daerah pesisir di seluruh Indonesia, baik di kota kecil maupun besar. Dan pada akhirnya kelangsungan umat manusia juga ikut terancam akibat dari

1 Jurnal *Tentang Perubahan Iklim. Korelasi Perencanaan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Mengusung Pembangunan Rendah Karbon*. Oleh: D.A. Nando

2 Dokumen UNFCCC-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sepanjang 2015-2019, bumi memanas 0,2 derajat Celsius dibanding 2011-2015.

dampak perubahan iklim.³ Mengatasi perubahan iklim termasuk salah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam agenda pembangunan berkelanjutan 2030, dan perlu adanya pendekatan terpadu demi kemajuan diseluruh tujuan dengan cara mengintegrasikan tindakan antisipatif perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.⁴ Sebagai negara yang tergabung dalam konveksi kerangka kerja perubahan iklim Perserikatan Bangsa Bangsa atau *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sejak 1992, Indonesia perlu melaksanakan komitmen pasca terlibat dalam Perjanjian Paris 2015 yang bertujuan menahan laju peningkatan temperatur global hingga dibawah 2 derajat celcius dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, serta membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim. Aksi perubahan iklim dan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca ini selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, karena iklim dunia secara menyeluruh sedang mengalami kerusakan sebagai konsekuensi aktivitas manusia, yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas yang menghalangi pantulan energi sinar matahari dari bumi yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan mengakibatkan bumi menjadi panas.⁵

Indonesia sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca memiliki posisi geografis yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim dengan membuat komitmen-komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca ditunjukkan pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada 3 Desember 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas

3 Jurnal yang ditulis Dr. Oksfiani Jufri Sumampouw, S.Pi., M.Kes. Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat. 2019

4 Sdg's. Bappenas.go.id. 13 Penanganan Perubahan Iklim. 2020

5 Artikel yang ditulis Soedjadi.K. Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan. Hal 195 dan 201

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Selain meratifikasi Protokol Kyoto, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau disingkat RAN-GRK. Peraturan Presiden ini adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan inti, baik secara langsung maupun kegiatan secara tidak langsung yang berdampak untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional yaitu menurunkan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan 41% bila ditambah dukungan internasional.⁶ Kegiatan rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) meliputi kegiatan dibidang pertanian, kehutanan, lahan gambut, energi, transportasi, industri, pengolahan limbah, serta kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini menjadi pedoman bagi setiap kementerian atau lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca, dan menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau disingkat dengan RAD-GRK. Adapun bagi masyarakat dan pelaku usaha RAN GRK dapat menjadi acuan dalam melakukan perencanaan selama kurun waktu 2010-2020.

Studi Pustaka Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik mempunyai banyak tafsir dan makna, tetapi secara prinsip dan esensi adalah sama. Pandangan dan paradigma kebijakan publik sebagai sebuah Ilmu mempunyai cara pandang tersendiri bagi sebagian ahli. Para ahli mengklasifikasikan makna kebijakan publik ke dalam 4 sudut pandang , yaitu: *Pertama*, Kebijakan sebagai keputusan, dan *kedua* bahwa kebijakan adalah segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut,

6 Anotasi Peraturan Presiden RAN-GRK. 2018

dikatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan.⁷

Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik juga diartikan sebagai suatu pola dimana didalam pola tersebut terdapat ketergantungan yang bersifat kompleks terhadap keputusan yang menentukan suatu tindakan yang dibuat oleh kelompok badan yang dimiliki oleh pemerintah. Berikut langkah-langkah atau tahapan kebijakan publik menurut Dunn:⁸

Gambar 1
Tahapan Kebijakan William Dunn



7 Ibid.

8 Analisis Kebijakan versi Dunn & Implementasinya diakses melalui website[<http://ejournal.kopertais4.or.id>]

PEMBAHASAN

Tahapan-Tahapan pembuatan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca

Dalam pembuatan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dari prosesnya dapat dikategorikan kedalam beberapa tahapan, diantaranya (1) identifikasi masalah dan agenda setting, (2) formulasi kebijakan dan adopsi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi kebijakan.⁹

Perumusan Masalah dan Agenda Setting

Masalah perubahan iklim juga telah menjadi masalah kebijakan publik terbesar yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif pada manusia dan lingkungan sekitarnya, Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim ini, bukan hanya dihasilkan oleh alam (seperti berasal dari letusan gunung merapi) namun gas rumah kaca juga dihasilkan oleh kegiatan manusia. Bahkan, laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menyatakan bahwa kegiatan manusia yang mempercepat kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akumulasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan panas berlebih diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Kelebihan panas yang terperangkap inilah yang kemudian menyebabkan temperatur bumi meningkat.

Itu sebabnya, perihal perubahan iklim tidak akan pernah lepas kaitannya dari aktivitas manusia, yang terbukti meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan berkontribusi pada terjadinya pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim.

Salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim yaitu dengan menjalankan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengurangan dampak negatif perubahan iklim diberbagai sektor. Upaya dan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak negatif dari perubahan iklim tentunya juga memperhatikan

⁹ Ibid.

trade off antara kebijakan penanganan perubahan iklim seperti penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap dampak negatif perubahan iklim, serta tercapainya sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam merumuskan suatu permasalahan atau agenda setting tentu bukanlah tanggung jawab dari pemerintah semata. Peran aktif dari pihak dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya penanganan perubahan iklim dan kebijakan penurunan emisi dapat tercapai secara efektif.¹⁰

Formulasi Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca adalah salah satu termasuk agenda kebijakan pada program mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Indonesia*. Tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lahan serta polusi udara dari kebakaran lahan gambut dan bahan bakar minyak akan berdampak negative bagi produktifitas dan kualitas hidup masyarakat, membuat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional membuat komitmen dan menginisiasi pembangunan rendah karbon dan bersiap untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan publik yang tepat diformulasikan atas nama masyarakat Indonesia yang menginginkan masa depan lingkungan yang rendah emisi. Aktor dan pemeran dalam proses pembentukan kebijakan terbagi menjadi dua kelompok, yakni para pemeran resmi dan pemeran tidak resmi. Pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok

10 Peranan Indonesia sebagai Anggota UNFCCC dalam Menangani Perubahan Iklim|<http://repository.unpas.ac.id>

pemeran tidak resmi meliputi kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.

Adopsi Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kebijakan ini diadopsi oleh Indonesia secara resmi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK. Pemerintah Republik Indonesia telah menghasilkan beberapa peraturan dan kebijakan mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa dokumen utama antara lain: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan *Indonesia Climate Change Sektoral Roadmap* (ICCSR). RAN-GRK adalah perencanaan jangka panjang yang mengatur usaha-usaha pengurangan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan substansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). RAN GRK merupakan acuan utama bagi aktor pembangunan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dalam perencanaan, implementasi, monitor, dan evaluasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Proses legalisasi RAN GRK dibuat melalui Peraturan Presiden.¹¹

Substansi pada RAN-GRK merupakan dasar bagi setiap provinsi dalam mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan kemampuan serta keterkaitannya terhadap kebijakan pembangunan masing-masing provinsi. Dengan demikian, RAD-GRK kemudian akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Penyusunan RAD-GRK diharapkan merupakan proses *Bottom-Up* yang menggambarkan bagaimana langkah yang akan ditempuh setiap provinsi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan kapasitas masing-masing. Lebih lanjut, setiap pemerintah provinsi perlu menghitung besar emisi gas rumah kaca masing-masing, target pengurangan, dan jenis sektor yang akan dikurangi emisinya. Namun demikian, pemerintah provinsi

11 Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)-2011

juga tetap harus memastikan pengurangan emisi gas rumah kaca didaerahnya tetap berkontribusi terhadap target pengurangan tingkat nasional ¹²

Implementasi Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Implementasi kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan cara melakukan penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi merupakan suatu proses berkesinambungan karena melibatkan upaya perbaikan yang dilakukan terus menerus sejalan dengan semakin berkembangnya ketersediaan data dan pengetahuan terkait dengan pendugaan emisi dan serapan GRK¹³. Hal ini diatur dalam pengaturan kelembagaan yang diterapkan dalam inventarisasi GRK nasional yang diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Sesuai mandat yang tercantum di Perpres 71 tahun 2011, penyusunan Inventarisasi GRK nasional melibatkan partisipasi aktif pemerintah sub-nasional seperti (provinsi, kabupaten dan kota). namun demikian dalam pengembangan inventarisasi GRK nasional saat ini hanya melibatkan kementerian/lembaga pusat. Dalam pengembangan inventarisasi GRK nasional, peran pemerintah daerah diperkuat secara berkelanjutan. Sehingga dimasa depan , pengembangan inventarisasi GRK akan dilengkapi melalui pendekatan Top Down dan Bottom Up, agar dibandingkan perhitungan yang dilakukan ditingkat nasional dengan agregasi hasil perhitungan yang dilakukan pemerintah daerah.

Dilapangan, pelaksanaan penurunan emisi perlu didasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menghasilkan penurunan emisi yang dapat dikuantifikasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan penurunan emisi melalui pemahaman terhadap sumber emisi di Indonesia, hal ini diharapkan dapat memberikan input langsung yang dapat dikuantifikasi untuk menurunkan emisi untuk mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

12 Ibid

13 Ditjenppi.menlhk.go.id "Kontribusi penurunan emisi grk nasional menuju NDC 2030"

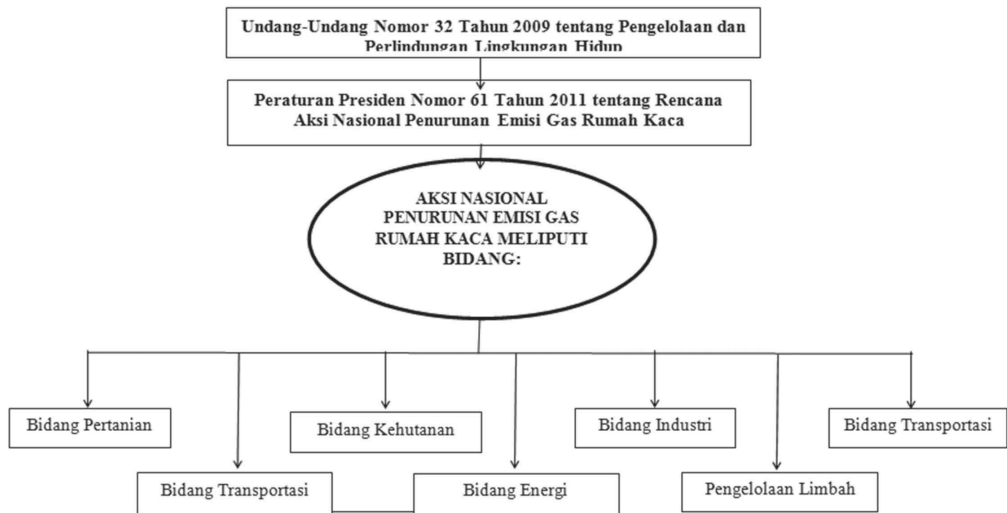
Penurunan Emisi GRK dan bagaimana cara sektor-sektor lain dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi global.¹⁴

Evaluasi Kebijakan

Setelah implementasi kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dinilai seberapa jauh suatu kebijakan publik tersebut dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang telah ditentukan.¹⁵

Berdasarkan pada pemetaan regulasi tentang penurunan emisi gas rumah kaca didapatkan beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam gambar berikut

Gambar 2 Regulasi pendukung penurunan emisi



Sumber: Dokumen RAN-GRK, Bappenas 2018

14 Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan untuk Mendukung Kebijakan Perpres Nomor 61 Tahun 2011, ditulis oleh Ari Wibowo

15 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Menurut Muhadjir dalam Widodo

Sementara itu secara spesifik regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam gerakan penurunan gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam table

Tabel 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang	Tentang
Undang Undang RI No. 16 tahun 2016	Pengesahan <i>Paris Agreement to The Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Peretujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Undang Undang RI No. 32 tahun 2009	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (mendasari Perubahan Iklim ada di bawah KemenLHK)
Undang Undang RI No. 11 tahun 2020	Cipta Kerja
Undang Undang RI No. 6 tahun 1994	Pengesahan <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Undang Undang RI No. 41 tahun 1999	Kehutanan

Sumber: Kebijakan dan Dokumen DITJEN PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lingkungan hidup sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan adanya kewenangan ini, maka kebijakan pemerintah daerah dapat berperan lebih besar dalam pengaturan lingkungan hidup dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di masing-masing daerah

Pada tataran idealisme, pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensi *sustainable*. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas dalam waktu yang tak terhingga. Oleh karena itu peran pemerintah sangatlah besar. Dengan ini pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pendukungnya antara lain;

Tabel 2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah	Tentang
PP No.46 Tahun 2017	Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No.83 Tahun 2019	Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
PP No.45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan
PP No.46 Tahun 2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
PP No.22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP No.23 Tahun 2021	Penyelenggaraan Kehutanan
PP No.24 Tahun 2021	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sumber: Kebijakan dan Dokumen DITJEN PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diutamakan ke dalam rencana Pembangunan Nasional.

Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah. Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi perubahan iklim.

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan serta kondisi sosial ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mengembangkan Sistem Informasi Data dan Indeks Kerentanan (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa diseluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi dan lingkungan Infrastruktur dari pendataan Potensi Desa (PODES). Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.¹⁶

Adapun beberapa contoh regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan banyaknya emisi GRK, Berikut kebijakan pendukungnya antara lain,

16 http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_sidik/BUKU_SIDIK_FINAL.pdf

Daftar Peraturan/SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3 Peraturan Tentang Lingkungan Hidup

PermenLHK / SK MenLHK	Tentang
P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016	Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
P.18/Menlhk-II/Setjen/2015	Organisasi Dan Tata Kerja kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016	Program Kampung Iklim
SK.777/Menlhk/Setjen/OTL.0/10/2016	Tim Pengarah Penyusunan Dokumen Komunikasi Nasional Ketiga Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim
SK.282/Menlhk/Setjen/PLA.1/6/2017	Peta Areal Kebakaran hutan dan Lahan Tahun 2015 dan Tahun 2016
P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017	Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks
P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017	Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017	Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim
P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017	Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018	Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, Dan Dampak Perubahan Iklim

P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018	Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan
P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018	Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas Dan/Atau Informasi Kebakaran Hutan Dan Lahan
SK.344/Menlhk/Setjen/OTL.2/5/2016	Tim Penyusunan Rancangan Undang -Undang Tentang Pengesahan Paris Agreement On Climate Change
S K . 6 7 9 / M E N L H K / S E T J E N / KUM.1/12/2017	Pemantauan Implementasi Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution - NDC)
P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Teknisi Refrigerasi Dan Teknisi Tata Udara

Sumber: Kebijakan dan Dokumen DITJEN PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Dari beberapa regulasi yang ada di berbagai kota, seperti Kota DKI Jakarta yang telah memiliki Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor adalah regulasi yang membidangi transportasi dan energi. Dalam implementasinya regulasi tersebut dijalankan oleh masyarakat DKI Jakarta yang memiliki kendaraan pribadi diwajibkan untuk uji emisi kendaraannya secara periodik. Hal ini memudahkan pemerintah DKI Jakarta berupaya menurunkan emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Karena dengan jumlah populasi penduduk yang padat di DKI Jakarta menyebabkan mobilitas yang padat, lalu lintas yang padat, konsumsi BBM yang cukup tinggi untuk kendaraan pribadi maka diperlukan uji emisi¹⁷

17 Noorhakim, Ovaldo. (2021). Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan di Jakarta (Ditinjau dari Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor). Jurnal Hukum Adigama. Volume 4 Nomor 1

Dampak peningkatan penggunaan kendaraan bermotor terhadap kualitas udara menempati posisi pertama dalam urutan penyebab polusi udara terutama di DKI Jakarta. Emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dikaitkan sebagai penyebab utama pencemaran udara di ibukota, oleh karena itu pengelolaan fungsi dilakukan dengan ketat dan menggunakan teknologi rendah karbon dengan tingkat efisiensi tinggi.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengetatkan aturan polusi udara. Dalam implementasinya bahwa setiap kendaraan harus memenuhi ambang batas emisi. Jika pemilik mobil atau motor tidak menjalani dan atau tidak lulus uji emisi gas buang, akan dikenakan sanksi berupa pemberian tarif parkir tertinggi dan tilang. Penegakan hukum di jalan akan dilakukan oleh kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan ancaman denda maksimal bagi pelanggar Rp250.000 untuk pengendara sepeda motor dan Rp500.000 untuk pengendara mobil, hukuman tilang ini mengacu pada undang-undang 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan pasal 285 dan pasal 286.¹⁸

Dengan adanya regulasi di bidang transportasi tentunya sangat membantu dalam penurunan emisi. DKI Jakarta adalah salah satu kota penyumbang emisi terbesar di Indonesia maka pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan koordinasi untuk mengimplementasikan aturan tersebut, agar masyarakat DKI Jakarta yang memiliki kendaraan sadar akan lingkungan hidup yang tercemari oleh polusi kendaraan bermotor. Hal ini juga termasuk perwujudan pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta yang merealisasikan poin 13 sustainable Development Goals yaitu mengatasi perubahan iklim.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wujudkan ketahanan iklim melalui berbagai aksi nyata dan kolaborasi dengan multi-stakeholder, baik pemerintah, komunitas dunia usaha maupun akademisi. Saat ini Jakarta kembangkan suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai melalui aksi perubahan iklim serta memperbarui rencana aksi perubahan iklim yang dimiliki DKI Jakarta. Beberapa aksi mitigasi yang disepakati antara lain, penyusunan target pengurangan emisi karbon, mendorong

18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

percepatan penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim, serta mengelola sistem dokumentasi, dan pelaporan emisi karbon dan Sistem Informasi Publik terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon¹⁹.

Dalam implementasinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta membentuk sebuah tim kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim di DKI Jakarta. Hal ini sebuah bentuk komitmen Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30%, dan telah didukung melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 96 tahun 2020 tentang tim kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim. Dalam merencanakan penurunan emisi gas rumah kaca, Salah satu hal yang penting adalah adanya sistem monitoring dan pelaporan terpadu secara real-time, sehingga capaian penurunan emisi untuk kebutuhan evaluasi dan perencanaan program penurunan emisi tiap tahunnya dapat terdokumentasi. Terkait fenomena banjir di Jakarta akibat Salah satu dampak perubahan iklim aksi mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman pohon, taman kota, Urban farming di sekitar Perumahan dan jalan untuk menjaga debit air sekaligus sebagai penangkap emisi gas rumah kaca dan penggunaan Setu atau Embung sebagai sumber air bersih. Upaya adaptasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan serta pemberdayaan masyarakat juga dapat dimaksimalkan melalui dukungan CSR, Provinsi DKI Jakarta seringkali menerima Debit air yang tinggi daerah hulu di Bogor, Hal ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta untuk melakukan CSR berupa pengembangan kapasitas, reboisasi, rehabilitasi, membangun sumur resapan di daerah hulu guna meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi debit banjir kiriman, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah hulu sungai.

19 Geri, Lumban. (2021). Pemprov DKI Bertekad Wujudkan Ketahanan Iklim Melalui Aksi Kolaborasi. Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta: beritajakarta.

SIMPULAN

Perubahan iklim tidak lagi sebagai isu, tetapi telah menjadi kenyataan yang memerlukan tindakan nyata secara bersama pada tingkat global, regional maupun nasional. Dalam menyikapi dampak emisi Gas Rumah Kaca yang berakibatkan perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah menyusun suatu strategi yang meliputi beberapa aspek seperti melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya merealisasikan target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi iklim yang telah diratifikasi. Tentunya dalam merealisasikan hal itu perlu tahapan dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk segera diselesaikan, baik itu yang berkaitan dengan regulasinya, instrumen pendanaannya, termasuk insentif bagi pemangku kepentingan. Komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global tercermin dalam partisipasi pada perjanjian paris yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Lalu peran pemerintah pusat dapat menyelaraskan tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dengan target pembangunan nasional, sub-nasional, dan internasional termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian pemerintah dapat merangkul pihak *non-party*, stakeholder, untuk mengembangkan inovasi dan memperkuat komunitas dalam upaya pengendalian perubahan iklim yang disertai dengan implementasi kebijakan-kebijakan lingkungan baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- All Habsy, Bakrudin. (2017). "Seni Memahami Penelitian Dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa*. Volume 1 Nomor 2 Halaman 90
- Apriandi, Mada. (2017). "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas." *Jurnal Bina Hukum dan Lingkungan*. Volume 1 Nomor 2, P-ISSN 2541-2353
- Baharudin, Hamza. (2020). "Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Krisis Iklim di Indonesia." *Kalabbirang Law Journal*. Volume 2 Nomor 2.
- Bebi Irama, Ade. (2019). "Potensi Penerimaan Negara dari emisi karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Info Artha*. Hal. 133-142. pdf.stan.ac.id
- Boedisantoso, Rahmat. (2016). "Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sektor Pertanian dan Peternakan di Kota Surabaya." *Jurnal Teknik ITS*. Vol 5 No 2, ISSN:2337-3539.
- D.A, Nando. (2019). "Tentang Perubahan Iklim, Korelasi Perencanaan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Mengusung Pembangunan Rendah Karbon." Volume 1. *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*; <http://www.walhi.or.id>.
- Dun, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
- Hasanah, Liana. (2019). "Kerjasama Indonesia Jepang dalam Joint Credit Mechanism pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia." *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*. Volume 1 Nomor 2, E-ISSN:2684-8082
- Hendri, Muthia Fadhillah. (2016). "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kampar." *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume III Nomor 1. <http://jom.unri.ac.id>

- Miranti, Retno. (2018). "Analisis Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Sebagai Upaya Mengakomodasi Paris Agreement." *Jurnal Unisri*. Volume 1 Nomor 34. <http://ejurnal.unisri.ac.id>
- Mami. (2016). "Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya Sebagai Wahana Peningkatan Kemampuan Dasar Sistemik Tumbuhan." *Jurnal Inovasi*. Volume XVIII. <https://journal.uwks.ac.id>
- Navy, Praherdyan. (2015). "Inovasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development (Studi pada Badan Lingkungna Hidup serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)." *Jurnal Pratama Universitas Brawijaya*
- Niswantari, Prayogi. (2015). "Analisis Proses Pembentukan Daerah tentang Hutan Kota di Surabaya." *Skripsi S1 Kehutanan*; Universitas Gadjah Mada
- Nur, Masripatin. (2019). *Trilogi Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku
- Nurita, Kaleresan. (2017). "Peranan Amdal dalam Perizinan Pembangunan Perumahan dikota Tangerang Selatan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. repository.umy.ac.id
- Oekan S, Abdoellah. (2017). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utam
- Pratiwi, Niken. (2018). "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Volume 18 Nomor 1, ISSN (P) 1412-2200
- Pujayanti, Adirini. (2010). *Pemanasan Global dan Perubahan Iklim*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
- Ridha, Rasyid. (2019). "Pengaruh Iklim Terhadap Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Ternate." *Spirakel*. Volume 11 Nomor 2. <http://doi.org/10.22435/spirakel.v11i2.1984>

- Riski, Dian Hardiana. (2018). "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta." *Jurnal Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Volume 1 <https://www.researchgate.net/publication>
- Sandi, Febriya. (2013). "Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*
- Sari. (2018). "Amdal Sebagai Instrumen dalam Mempertahankan Sustainable Development yang Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. journaluniversitassuryadarma.ac.id
- Sugiyono, Agus. (2002). "Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Lingkungan*. Vol 1. Hal 15 . www.Researchgate.net
- Windyswara, Dhysti. (2018). "Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. ISSN:2477-2615. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
- Yun Santoso, Wahyu. (2015). "Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim." *Jurnal Harlev*. Volume 1, E-ISSN:442:9899
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Laporan Dua Tahun Pelaksanaan RAN-GRK dan RAD GRK*. Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Program Pengendalian Perubahan Iklim, Indonesia 2020-2024*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Laporan-Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim. (2020). *Strategi Transisi Energi Berkeadilan di Kalimantan Timur*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Indonesia Menuju 20.000 Kampung Iklim*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Dokumen Humas Kaltim. (2020). *Kaltim Siap Peroleh Insentif Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca*. Samarinda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Indonesia Green Growth Program. (2020). *Milestone Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Lahan di Provinsi Kalimantan Timur*. The Government of Indonesia & GGGI

DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN *MOESLIM FRIENDLY TOURISM* DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Angga Sulaiman¹; Aditya Prasetyo²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional ^{1,2}
e-mail: angga_nelwan@yahoo.co.id¹; adtyaprstyo@gmail.com ²

Abstract

Pariwisata halal adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan menerapkan konsep “halal” selama perjalanan wisata. Aspek yang ditawarkan yaitu memudahkan wisatawan untuk melaksanakan ibadah, terdapat makanan atau minuman halal dan adanya pembatas untuk wisatawan muslim pria dan wanita dalam perjalanan. Salah satu obyek wisata yang paling terkenal di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Barat. Dengan berbagai potensi yang ada maka pemerintah daerah dan masyarakat melakukan berbagai upaya pengembangan pariwisata yang terdiri dari atraksi wisata, promosi atau pemasaran, transportasi serta fasilitas dan pelayanan wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun dalam pengembangannya wisata halal menemukan hambatan yaitu karena adanya Covid-19 yang berakibat pada perubahan pola kebiasaan pada manusia nantinya dan penurunan tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat dari wisata halal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pengembangan wisata halal dalam masa pandemic Covid dengan melihat terhadap perekonomian masyarakat UMKM setempat. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder.

Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengembangan wisata halal dalam masa pandemi covid-19 wisata halal di kabupaten lombok barat ini sudah baik, tetapi karena adanya Covid-19 membuat masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM banyak yang tutup yang disebabkan karena kunjungan wisatawan berkurang yang mengakibatkan penurunan pendapatan secara drastis dirasakan mereka. Dan masih terdapat dampak positif dan negatif dalam pengembangan wisata halal ini yang harus menjadi perhatian lebih untuk Pemerintah Daerah Lombok Barat.

Keywords: Wisata Halal, Perekonomian; Masyarakat; Covid-19

Pendahuluan

Pariwisata adalah kegiatan darmawisata yang dilakukan secara sementara dari satu tempat ke tempat lain untuk menikmati kesenangan perjalanan, bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi hanya menikmati perjalanan untuk memenuhi berbagai keinginannya. Pariwisata adalah suatu ragam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah serta pemerintah daerah. Elemen-elemen ini harus saling mendukung dan melengkapi untuk pelaksanaan pariwisata yang terbaik. Pengelolaan pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik jika salah satu faktor tidak dapat mendukung kegiatan pariwisata. Indonesia saat ini merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dari 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia jumlah penduduk muslimnya sebesar 207.176.162.3 tidak hanya itu Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 800.000 masjid serta sumber daya alam yang cukup untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung pencapaian nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁴ Saat ini konsep wisata halal sedang marak dan menjadi trend di Indonesia. Hal itu juga terjadi pada industri pariwisata di kawasan timur Indonesia, tepatnya di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2015, Lombok membuktikan kesiapannya terhadap sumber daya manusia, keanekaragaman produk pariwisata daerah, budaya masyarakatnya dan akomodasi wisatanya untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata halal paling bergengsi di dunia yang diadakan di Abu Dhabi. Konsep pariwisata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pariwisata bisa diartikan sebagai aktivitas travelling dari rumah dengan tujuan bukan untuk berbisnis atau sekedar bersantai. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai bisnis yang peduli dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan merupakan bisnis yang hemat biaya untuk wisatawan/pengunjung dalam perjalanannya. Secara umum, jumlah wisatawan dunia pada tahun 2014 meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1.110 juta. Pada tahun 2014, 27,1% wisatawan dunia atau sekitar 300 jutaan wisatawan dunia berwisata ke Asia dan yang berkunjung ke Asia Tenggara itu mencapai 96,7 juta wisatawan dunia. Setahun kemudian, pada tahun 2015 di tengah situasi global yang kurang kondusif, proporsi dua wisatawan yang melakukan perjalanan meningkat 4,5%. Oleh karena itu, pariwisata terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (16), meliputi kegiatan kunjungan wisata maka destinasi dan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar syariah.⁸ Sedangkan pada Pasal 2, pengaturan pariwisata halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelolaan dalam kepariwisataan. Adapun penjelasan Perda tersebut yaitu pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkan kembangkan perekonomian suatu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat daerah. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, sehingga setiap pemangku kepentingan di industri pariwisata baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat, harus dapat bekerja sama dan mempersiapkan bersama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal. Sarana dan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar pariwisata. Mengenai ruang lingkup pengaturan

pariwisata halal diatur di dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Pasal 5, yang meliputi destinasi, pemasaran atau promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan serta pembiyaan.

Konsep pariwisata halal menggambarkan penyesuaian kegiatan aktivitas wisata dengan konteks penerapan syariat Islam. Konsep ini terkait dengan harapan agar daerah wisata di Nusa Tenggara Barat dalam hal standar syariah, pariwisata halal harus mempunyai akomodasi yang sesuai dengan standar syariah, yang meliputi tersedianya fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedianya fasilitas yang bisa memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman serta kondusif untuk keluarga dan bisnis, dan dapat terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Maka daripada itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyikapi pengembangan pariwisata halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman serta legalitas dalam pelaksanaannya pada Perda NTB No. 2 Tahun 2016. Dalam pengembangannya terdapat masalah global yang berdampak pada kegiatan pariwisata halal di Lombok. Kasus tersebut ialah kasus penyakit Corona Virus (Covid-19) yang muncul di Wuhan Cina, sejak desember 2019. Pemerintah Indonesia melaporkan situasi positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Respon cepat terhadap penanggulangan penyebaran infeksi Covid-19 diperkirakan akan memberi dampak yang negatif terhadap perekonomian dan kelangsungan hidup penduduk. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berpandangan bahwa, respon darurat medis pada penanggulangan Covid-19 perlu disertai dengan dukungan penanggulangan dampak ekonomi terhadap dunia usaha serta kehidupan masyarakat, khususnya pada keluarga miskin dan yang hampir miskin.

Disamping ditentukan oleh jenis sektor, dampak Covid-19 terhadap keberlanjutan usaha juga ditentukan oleh skala usaha. Pada usaha jenis skala besar memiliki ketahanan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis usaha skala kecil dan mikro (UKM). Dengan kata lain, UKM merupakan sasaran yang lebih rentan terdampak Covid-19 jika dibandingkan oleh usaha skala besar. Usaha skala besar yang terdampak bisa melakukan penghentian sementara operasi pada saat Covid-19 melanda, kemudian mampu mengoperasikannya kembali pada saat keadaan telah kembali normal karena mempunyai kapasitas

permodalan serta akses pembiayaan yang cukup memadai. Berbeda dengan, UKM yang terdampak mereka tidak mampu bangkit kembali beroperasi pada saat keadaan telah kembali normal karena modal yang terkikis untuk menutupi biaya hidup keluarga (aliran pendapatannya macet selama usaha tidak beroperasi). Berdasarkan data statistik, usaha Kabupaten Lombok Barat menunjukkan terdapat sebanyak 16 unit usaha industri pengolahan skala besar, 526 unit usaha industri pengolahan formal, dan 10.098 unit usaha industri pengolahan informal pada tahun 2016. Usaha industri pengolahan skala kecil dan menengah formal dan/atau informal dapat memperkerjakan sebanyak 5.030 dan 20.087 pekerja di tahun yang sama. Selanjutnya mengenai jumlah pedagang besar, sedang dan kecil sebanyak 7.225 orang pada tahun 2018.

Akan tetapi dengan konsep wisata halal atau halal tourism di tengah pandemi Covid-19 saat ini, dinilai dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Bahkan, wisata halal dinilai menjadi 'vaksin' pariwisata di masa pandemi, karena sangat selaras dengan kebijakan era new normal Covid-19. "Wisata halal merupakan solusi untuk pandemi Covid-19. Halal itu berbicara mengenai kebersihan, kesehatan makanan yang sehat dan tempat yang bersih", (Sumber: Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagia di Mataram). Lebih lanjut dijelaskan, inovasi wisata halal yang diterapkan di NTB membuat menjadi pemenang pada *World Halal Travel Award* di tahun 2016, bukan hanya berbicara tentang Islam. Namun, lebih kepada layanan serta tempat yang mengedepankan kebersihan. Sehingga wisatawan yang datang akan ditawarkan dengan dua pilihan wisata, apakah ingin menikmati konsep wisata konvensional atau konsep wisata halal. Tentunya dengan pilihan ini bisa menjadi pemantik dalam mempercepat pemulihan pariwisata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dipahami bahwa wisata halal/fokus pada penduduk muslim merupakan salah satu bidang usaha yang dianggap membuka peluang investasi yang sangat terbuka bagi sektor ekonomi syariah, seperti, makanan/minuman halal, busana syariah/sederhana dan subsektor serta infrastruktur pendukungnya. Untuk perjalanan halal, mungkin ada hotel dengan pariwisata berorientasi Muslim, manufaktur makanan, ekspor dan gerai ritel untuk makanan halal, dan/atau tekstil dan e-commerce dengan harga yang murah. Selain

itu, sektor pariwisata halal diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, wabah virus Covid-19 telah menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global dalam negeri, vitalitas pasar keuangan, guncangan dalam permintaan konsumen dan dampak buruk pada industri utama seperti perjalanan dan pariwisata. Terdapat urgensi di mana penulis melihat bahwa potensi pariwisata halal dapat menjadi daya tarik terhadap wisatawan dengan memberikan penawaran lebih kepada pelayanan, keamanan, kesehatan mengenai makanan yang sehat serta tempat yang bersih. Sehingga Indonesia dapat menjadi pendorong untuk merevitalisasi pariwisata dan dapat menarik wisatawan dalam jumlah yang besar sehingga berakibat pada peningkatan perekonomian pemerintah daerah dan masyarakat khususnya dibidang UMKM. Selain itu tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dampak kebijakan moeslim friendly tourism dalam masa pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

Kajian Pustaka

Kebijakan atau *policy* terkait dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan penilaian dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut pada individu yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengatur kependudukan dari atas sampai bawah. (Anggara, 2014). Jika pemerintah ingin melakukan sesuatu, harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan negara yang mencakup semua tindakan negara. Jadi bukan sekedar deklarasi keinginan pemerintah atau aparat pemerintah. Selain daripada itu, sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan memiliki pengaruh sebesar yang dilakukan oleh pemerintah (Marzali, 2012). Bahkan disebut sebagai indakan bersama yang terkait dengan masalah tertentu atau sekelompok masalah terkait yang mempengaruhi masyarakat secara umum (Wahab, 2015). Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan berbentuk tindakan pemerintah. Kebijakan publik dibuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Kebijakan publik juga ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan kebijakan

publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai bagian dari pemerintahan. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang dilegitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang didasarkan pada teori, model atau hipotesis tentang sebab dan akibat. Kebijakan selalu didasarkan pada asumsi-asumsi tentang perilaku (Tangkilisan, 2012; Anggara; 2014). Oleh karena itu, definisi kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah secara legal dapat melakukan sesuatu untuk rakyatnya sendiri, dan keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu muncul dalam penentuan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2012). Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi dengan mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan yang diformulasikan atau dibuat untuk kepentingan masyarakat seperti yang diketahui memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai kebijakan maka setelah dilakukannya implementasi pada akhirnya juga akan memiliki dampak dari sebuah kebijakan tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya (Rusli, 2014; Wahab, 2015). Dampak atau biasa disebut impact merupakan pencerminan hasil dari implementasi kebijakan, maksudnya adalah dalam kebijakan publik dampak merupakan suatu kajian untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan publik itu. Terkadang kebijakan dalam pengimplementasian dapat berjalan sesuai rencana bisa juga tidak. Jadi, dalam hal ini melihat

tujuan kebijakan merupakan hal yang patut dilakukan tetapi hasil dari suatu kebijakan tidak bisa diketahui tanpa implementasi, dan jika implementasi dari suatu kebijakan sudah dilaksanakan, dari situ akan menyebabkan dampak pada target kebijakan, dampak tersebut nanti yang akan diselaraskan dengan tujuan kebijakan dan menjadi pertimbangan (Winarno, 2013). Berangkat dari hal tersebut melihat hasil bukan batasan dalam menilai efektif tidaknya suatu kebijakan tetapi juga melihat konsekuensi dari kebijakan tersebut atau dampaknya.

Perlu diketahui bahwa dampak kebijakan dibedakan menjadi dua, yakni *Policy Impact* dan *Policy Output*. *Policy impact* adalah akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilakukannya suatu kebijakan, sedangkan *policy output* merupakan apa yang dihasilkan proses dalam perumusan kebijakan. Jadi, dampak merupakan hasil atau akibat setelah kebijakan terimplementasi sedangkan *policy output* merupakan hasil dari kebijakan itu dan kedua ini harus dapat dibedakan. Terkait dengan dampak kebijakan dan keselarasannya dengan tujuan kebijakan, setiap kebijakan memiliki dampak yang berbeda-beda pada kondisi nyata setelah implementasi dilaksanakan. Dampak dan implementasi kebijakan merupakan hal yang saling berkaitan karena seyogyanya implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan dalam merealisasikan tujuan dengan direalisasikannya tujuan, dampak dari kegiatan pemerintah akan terlihat setelah dilaksanakannya implementasi. Disamping dampak positif pariwisata terhadap ekonomi, terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan pariwisata. Namun pada umumnya dampak negatif ini memiliki magnitude yang lebih kecil daripada dampak positifnya.

Metode

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti lebih rinci, dibentuk dengan katakata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Kembali pada definisi di sini dikemukakan tentang peranan penting dan apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Sugiyono, 2014). Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau gejala. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Peneliti juga akan mewawancarai wakil ketua atau sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Barat, serta masyarakat yang terlibat dalam pariwisata halal (ditargetkan sebanyak 210 pengelola UMKM bidang pariwisata). Sehingga Dalam setiap pelaksanaan penelitian selalu diusahakan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dengan harapan data yang sudah diperoleh dan terkumpul akan mampu menjawab permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisa terhadap data tersebut. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Results and Discussion

Kawasan Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hadirnya berbagai destinasi wisata dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Lombok barat karena didukung oleh berbagai faktor. Pengembangan pariwisata di Lombok Barat harus dikelola, direncanakan, dan dikoordinasikan untuk menghindari konflik kepentingan. Pertumbuhan industri pariwisata mendorong Kabupaten Lombok Barat menjadi kegiatan bisnis. Dalam rangka memberikan dukungan bagi penyelenggara usaha pariwisata sebagai daerah tujuan wisata, Lombok Barat mempunyai keunggulan komperatif karena letaknya yang strategis, serta memiliki obyek dan daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi. Demikian juga halnya dengan berbagai fasilitas penunjang kepariwisataan seperti akomodasi, restoran,

biro perjalan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit/ klinik bertaraf internasional yang siap melayani kebutuhan wisatawan.

Ditunjuknya Pulau Lombok di forum yang bertema “Wonderful Indonesia as Moeslim Friendly Destination” memang wajar. Pulau Nusa Tenggara Barat tepatnya Kabupaten Lombok Barat, mempunyai panorama alam yang mempesona dengan sederet pantai pasir putih yang dibalut dengan khazanah budaya berharga yang benar benar menarik minat wisatawan.⁷¹ Dengan demikian, proses pembentukan kebijakan pariwisata halal sangat penting untuk kemajuan perkembangan pariwisata halal kedepannya sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pihak terkait agar kebijakan tersebut dapat berhasil pada saat diimplementasikan dan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat. Implementasi kebijakan pariwisata dengan konsep “halal” yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten lombok barat selaku regulator dan dinas pariwisata lombok barat selaku implementator kebijakan seharusnya dapat mengerti mengenai seluruh aktivitas terkait wisata halal. Maka sejalan dengan itu, peneliti mencoba menggali jawaban mengenai yang melatarbelakangi terbentuknya wisata halal di lombok.

“Pembentukan kebijakan pariwisata halal di bumi NTB ini karena mayoritas penduduk beragama islam sehingga tanpa adanya kebijakan pariwisata halal pun masyarakat sudah menetapkan standar keislaman dalam pariwisata dan kesehariannya karena pariwisata halal ini menyangkup seluruh kegiatan wisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, adapun alasan lainnya karena NTB mempunyai panorama alam yang indah dengan balutan atraksi budaya yang dapat menarik minat kunjungan wisatawan” [SDM dan Ekraf, Januari 2021]

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa terkait alasan pembentukan pariwisata halal dilatarbelakangi oleh faktor agama masyarakat setempat yang memang sudah menerapkan nilai keislaman pada kesehariannya dan memang kegiatan pariwisata halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Selain itu, faktor daya tarik wisata yang meliputi destinasi pantai dan budaya serta atraksi wisata menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan pariwisata halal untuk perkembangan industri pariwisata di kabupaten Lombok barat.

Pariwisata halal ini ditujukan untuk seluruh wisatawan tidak hanya untuk wisatawan muslim saja, dan dalam pemilihan wisatawan untuk memilih ingin menggunakan wisata halal atau konvensional. Tidak harus memilih, hanya saja bagi wisatawan yang akan berwisata akan memudahkan dalam hal ibadah sholat dan menemukan makanan/minuman halal. [SDM dan Ekraf, Januari 2021]

Dalam fokus pariwisata halal ini terdapat tiga aspek, pertama mengenai tersedianya makanan/minuman halal dan tempat ibadah sholat yang bersih, serta kamar kecil yang tersedia air bersih, kedua, pelayanan selama bulan Ramadhan, pengalaman dengan muslim local dan yang berhubungan dengan identitas muslim dan warisan muslim, dan ketiga, adanya fasilitas rekreasi yang memuat privasi antara pria dan wanita. [SDM dan Ekraf, Januari 2021]

Mengenai akomodasi, restoran, biro perjalanan dan lainnya dalam konsep halal ini, sudah adanya hotel yang menerapkannya, seperti memiliki kiblat sholat di kamar hotel, terdapat keran air untuk berwudhu di kamar mandi hotel, terdapat sajadah dan quran, didatarkannya informasi mengenai letak masjid/musholla terdekat, makanan dan minuman yang berlabel halal atau tersertifikasi halal. Dan mengenai hotel, restoran, biro perjalanan dan fasilitas perjalanan lainnya mempunyai ketentuan tersendiri yang didasarkan pada ketentuan DSN-MUI tetapi dalam proses sertifikasi belum terealisasi dengan baik karena masih berupa wacana. [SDM dan Ekraf, Januari 2021]

Peningkatan pada jumlah kunjungan pariwisata halal ini didominasi oleh wisatawan mancanegara khususnya wisatawan muslim dari Timur Tengah seperti Arab, Mesir, Dubai dan lainnya, wisatawan Eropa dan dari berbagai wisatawan mancanegara dari Asia, serta peningkatan kunjungan wisatawan local. Peningkatan pun kembali terjadi pasca bencana alam gempa bumi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah kunjungan pariwisata sebanyak 447.750 orang. Dan ditahun 2020 setelah datangnya Covid-19 di Indonesia tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan yang drastis dengan jumlah wisatawan sebanyak 142.579 orang. [SDM dan Ekraf, Januari 2021]

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan setelah pembentukan kebijakan pariwisata halal meningkat pesat dengan berbagai kunjungan baik wisatawan domestik maupun wisatawan

internasional dan wisatawan muslim. Maka dengan jumlah peningkatan wisatawan baik domestik atau mancanegara yang berkunjung ke Lombok Barat, pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat menyikapinya dan menunjukkan komitmen dalam keseriusan penyelenggaraan wisata halal dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan, ketentuan mengenai akomodasi, restoran, biro perjalanan atau fasilitas perjalanan lainnya mengacu pada DSN-MUI tetapi pada realisasinya masih terdapat tempat seperti hotel dan restoran yang belum memiliki atau belum tersertifikasi halal, karena sertifikasi yang digunakan dalam konsep wisata halal masih belum bisa terealisasi atau masih wacana. Sejalan dengan itu dalam pengembangan pariwisata baik dengan menerapkan konsep “halal” atau konvensional perlu tersedianya fasilitas pendukung untuk dapat digunakan oleh wisatawan.

Dampak kedua adalah dampak kebijakan terhadap keadaan atau kelompok di luar sasaran kebijakan. Dalam konteks ini dimensi yang dimaksud adalah yang diluar sasaran kebijakan atau masyarakat setempat baik yang beragama muslim atau yang lainnya. Dengan datangnya kebijakan yang menerapkan konsep halal dalam kegiatan pariwisata maka akan terjadi timbulnya konflik perbedaan pendapat.

Kebijakan pariwisata halal ini sudah disosialisasikan kepada pelaku usaha, stakeholder dan masyarakat setempat. Sejalan dengan itu menurut penuturan yang disampaikan pak abdul selaku UMKM mengatakan, sosialisasi mengenai kebijakan pariwisata halal pernah dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten Lombok barat dengan bentuk pamflet atau surat edaran. [SDM dan Ekraf, Januari 2021]

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Lombok barat mengenai akses belum semua merata sebab pasca gempa bumi Lombok barat masih dalam tahap pembangunan seperti yang peneliti temukan masih ditemukan jalan yang belum mempunyai penerangan yang baik. Sejalan dengan itu peneliti menemukan mengenai aksesibilitas di pariwisata Lombok barat. Akses yang dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang meliputi kemudahan akses udara

yang meliputi pilihan rute penerbangan domestic internasional serta pilihan maskapai yang tersedia, ketersediaan pada akses kereta api serta berbagai jenis layanan kereta api yang ditawarkan dan rute yang tersedia baik dalam kota maupun antar kota/provinsi, kemudian ketersediaan akses laut atau pelabuhan/perairan, lalu pada infrastruktur yang ada di destinasi seperti kualitas jalan, ketersediaan lampu penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya seperti cctv dan lainnya. Komponen-komponen ini dinilai sebagai kemudahan aksesibilitas dari destinasi melalui beberapa pilihan mode transportasi agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk sampai di destinasi.

Dampak kebijakan pengembangan pariwisata halal dalam masa pandemi covid-19, yang dibentuk sebagai strategi pada masa covid-19 agar menarik kunjungan wisatawan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas pariwisata sebagai pelaksana kebijakan dalam program wisata halal dengan mengacu kepada IMTI. Hal106 tersebut sebagaimana dijelaskan dalam “Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah” dalam penilain yang pertama akses, akses dalam hal ini adalah mengenai kelayakan fasilitas, terdapat empat aspek yang dimana pertama, Air Acces atau Akses bandara dimana Lombok memiliki dua bandara domestic dan satu bandara internasional Lombok Praya dengan melayani penerbangan domestic menggunakan maskapai Garuda Indonesia, Nam Air, Air Asia, Lion Air, Batik Air, dan Citilink dengan rute perjalanan menuju Denpasar, Praya-Bima, Praya-sumbawa, Yogyakarta, Surabaya, Cengkareng, Makassar dan Jakarta. Selain itu juga terdapat penerbangan internasional dengan rute Kuala Lumpur menggunakan maskapai Air Asia. Terdapat juga rute internasional dengan lebih dari tiga maskapai dan hal lainnya. Kedua, Rail Acces atau akses kereta api Lombok belum memiliki akses atau jalur kereta api baik sebagai penyambung antar pulau atau di dalam pulau. Ketiga, Sea Acces atau akses pelabuhan dimana Lombok memiliki cruise terminal, yaitu Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Bangsal dengan rute perjalanan menuju Pulau Bali dan Surabaya. Terakhir, Road Infrastructure atau sarana prasarana jalan, berdasarkan data kualitas jalan menurut BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai data jenis permukaan dan kondisi jalan, dapat disimpulkan bahwa 63% jalan dalam kondisi baik, sementara sebesar 25% panjang jalan dalam kondisi sedang. Selain itu, 90% kondisi jalan utama menuju obyek

wisata juga telah diaspal. Dan berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan kualitas jalan di kabupaten Lombok Barat dapat masuk kedalam katagori baik tetapi masih kurangnya lampu penerangan di jalan.

Harga yang tinggi mengakibatkan banyak wisatawan membawa makan dari luar dan ditempat wisata mereka tidak membelanjakan uang mereka untuk membeli sesuatu hal tersebut akan mengurangi pendapatan masyarakat yang berdagang diwilayah wisata disini masyarakat yang berdagang tidak bisa disalahkan akan tetapi pemerintah juga harus berperang lebih guna memberi keadilan kepada masyarakat karena harga yang ditawarkan oleh pengusah yang memiliki modal tidak kalah tinggi dengan lokal, tetapi mereka mempunyai keunggulan dari segi kenyamanan dengan menyediakan kelengkapan barang yang menjadikan wisatawan lebih memilih berbelanja di tempat tersebut.

Hasil Observasi Indikator Dampak Kebijakan Pengembangan Moeslim Friendly Tourism Kabupaten Lombok Barat, penulis menginterpretasikan bahwa secara umum dampak kebijakan pengembangan Moeslim Friendly Tourism di Kabupaten Lombok berdampak positif dan negatif, namun masih terdapat yang mesti diperhatikan dan ditingkatkan jika dilihat dalam 6 aspek yang digunakan penulis untuk menilai dampak kebijakan pengembangan wisata halal.

1. Dampak kebijakan pada situasi sasaran atau kelompok; Pada dimensi pertama ini wisata halal telah memberikan dampak positif kepada wisatawan dan pendapatan bruto daerah, hal ini dilihat dari tingkat kunjungan wisata halal di lombok ketika memenangkan penghargaan pada tahun 2015, selain itu juga dampak yang dirasakan pada wisatawan yaitu dengan mudahnya akses seperti terdapat bandara, pelabuhan, jasa transportasi, terdapatnya akomodasi yang menyediakan arah kiblat, air keran untuk berwudhu dan yang menunjang untuk kegiatan ibadah. Menyediakan daya tarik wisata yang dapat dinikmati wisatawan dengan tetap memelihara pemisah antara pria dan wanita.
2. Dampak pada situasi yang bukan sasaran atau kelompok; Pada dimensi kedua ini wisata halal telah memberikan dampak positif kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pergeseran mata pencaharian masyarakat yang berawal dari sektor pertanian dan nelayan membuka usaha menjadi pedagang, dan banyak masyarakat yang memanfaatkan dengan membuka toko, warung makan, jasa

transportasi dan dampak positif lainnya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

3. Dampak kebijakan pada masa sekarang dan yang akan datang; Pada dimensi ketiga ini wisata halal dapat mengalami peristiwa terburuknya yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan kunjungan wisatawan. Seperti saat ini Covid-19 telah membuat penurunan pada kunjungan yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat, hal ini sudah cepat direspon dengan pembuatan kebijakan pembatasan sosial namun hal itu justru membuat perekonomian masyarakat semakin sulit. Protokol kesehatan dengan mengacu pada 3M harus terus dilakukan karena akibat dari pandemic ini akan merubah kebiasaan manusia pada sebelumnya.
4. Biaya langsung; Dalam dimensi keempat ini wisata halal perlu didasari oleh pemahaman dan bagaimana cara mengelolanya, maka dengan itu dinas pariwisata lombok barat telah bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan itu berupa pelatihan atau keterampilan agar kualitas sumber daya manusia di sekitar wisata dihargai dengan mahal dan dari hasil pelatihan atau bimbingan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan akan diberikan sertifikasi untuk usahanya. Mengenai akses lombok barat sudah dapat dibilang 80% sudah bagus dalam peningkatan akses sudah terdapat jasa transportasi untuk wisatawan, khusus daerah prioritas jalanan menuju kesana sudah diaspal dan terdapat penerangan jalan. Namun terdapat dampak warung makan, jasa transportasi dan dampak positif lainnya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
5. Dampak kebijakan pada masa sekarang dan yang akan datang; Pada dimensi ketiga ini wisata halal dapat mengalami peristiwa terburuknya yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan kunjungan wisatawan. Seperti saat ini Covid-19 telah membuat penurunan pada kunjungan yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat, hal ini sudah cepat direspon dengan pembuatan kebijakan pembatasan sosial namun hal itu justru membuat perekonomian masyarakat semakin sulit. Protokol kesehatan dengan mengacu

pada 3M harus terus dilakukan karena akibat dari pandemic ini akan merubah kebiasaan manusia pada sebelumnya.

6. Biaya langsung; Dalam dimensi keempat ini wisata halal perlu didasari oleh pemahaman dan bagaimana cara mengelolanya, maka dengan itu dinas pariwisata lombok barat telah bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan itu berupa pelatihan atau keterampilan agar kualitas sumber daya manusia di sekitar wisata dihargai dengan mahal dan dari hasil pelatihan atau bimbingan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan akan diberikan sertifikasi untuk usahanya. Mengenai akses lombok barat sudah dapat dibilang 80% sudah bagus dalam peningkatan akses sudah terdapat jasa transportasi untuk wisatawan, khusus daerah prioritas jalanan menuju kesana pun sudah diaspal dan terdapat penerangan jalan. Namun terdapat dampak.

Kesimpulan

Secara menyeluruh, baik dari aspek keterlibatan, aspek waktu dan aspek biaya yang harus ditanggung sebagai dampak Covid-19. Covid-19 memberikan dampak yang sangat luas terhadap bidang pariwisata khususnya wisata halal di Kabupaten Lombok Barat. Beberapa aspek yang terkena dampak langsung Covid-19 adalah stakeholder, pengelola hotel dan restoran, wisatawan, UMKM dan masyarakat. Dimulainya Pariwisata Halal pada tahun 2015 karena meraih dua penghargaan destination Halal Tourism menarik minat wisatawan khususnya wisatawan Timur Tengah seperti arab, dubai, mesir untuk berkunjung ke Lombok dan wisatawan Eropa serta asia juga hadir untuk menikmati wisata yang ada di Lombok barat ini. Dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Lombok tidak terdapat penolakan dari masyarakat sebab menurut mereka dalam kesehariannya sudah menerapkan prinsip islami di kehidupan sehari-hari. Dan branding "halal" pun dipilih karena hanya mencangkup mengenai kenyamanan dalam menjalankan ibadah seperti adanya arah kiblat di hotel dan adanya keran untuk mengambil wudhu, adanya pelayanan yang dipisahkan antara wanita dan pria serta tersedianya makanan dan minuman halal yang mempunyai logo halal jika tidak tersertifikasi.

Pergeseran mata pencaharian pun terlihat dari peningkatan lapangan pekerjaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat terlihat dari sektor pertanian ke sektor jasa, seperti jasa transportasi dan pemandu wisata, berkembangnya sektor perdagangan dan industri rumah seperti toko-toko, warung, kedai-kedai minuman, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan art shop. Peningkatan ekonomi pun dapat dirasakan karena bisa melanjutkan pendidikan dan kesehatan, akan tetapi hal tersebut seketika berhenti, ketika covid-19 datang ke Indonesia dimana kebijakan pembatasan social berlaku yang membuat pintu masuk wisatawan tertutup. Hal tersebut pulalah yang membuat pelaku UMKM jatuh kelubang yang paling dalam karena tidak adanya pemasukan yang dirasakan sebab berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi pendapatan yang mereka dapatkan masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan karena mereka kalah bersaing dengan pengusaha yang mempunyai modal. Khususnya para pedagang lebih cenderung untuk menaikkan harga barang dagangan untuk meningkatkan pendapatan mereka tapi hal tersebut malah membuat wisatawan berbelanja diluar tempat wisata karena harga yang lebih murah, walaupun berbelanja ditempat wisata mereka lebih memilih toko-toko yang mewah karena lebih nyaman sehingga membuat pendapatan masyarakat tidak meningkat. Selain itu pun masih terdapat masyarakat yang belum memahami terkait konsep halal, dan proses penyaluran sertifikasi halal belum membaik dari hulu ke hilir.

Reference

- Adinugraha Hendri Hermawan, Mila Sartika dan Ana Kadarningsih, Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Human Falah*, vol. 5 no. 1 (1 Januari – Juni 2018).
- Jaelani Abdul Kadir, Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (*Jurnal Pariwisata*, vol.5, No. 1, April 2018).
- Nizar Muhammad, Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Taman Wisata Religi Gunung Mujur Karangploso Malang, *Jurnal Al-ghazwah*, volume 1 nomor 1 (Universitas Yudharta Pasuruan,2017)
- Ramadhani Fitratun dan Ridlwan Ahmad Ajib, Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Muslim Heritage*, Universitas Negeri Surabaya, Vol.3, No.1 (Mei 2018).
- Syarifuddin, Analisis Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya, *Jurnal Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).
- Widagdyo Kurniawan Gilang, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”, *The Journal of Tauhidinomics* Vol.1 (2015).
- Sudirman Suparmin dan Yusrizal, Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Utara, *Tansiq*, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Roby Ardiwidjaja.t.t. “Sustainable Tourism Development in indoneisa”, *Researcher of Tourism and Creative Economy Ministry*.

Soebagyo. 2012, Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. Jurnal Liquidity, Vol. 1 No. 2

Suparwoko. 2012. "Tourism Development In Indonesia", Researchgate, July 2012

Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto. t.t. "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4

William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction (Analisis Kebijakan Publik), terjemahan Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003, Hal. 132

Referensi Naskah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal.

Prasadja Tan Rio Budi, Kunci Sukses Memasarkan Jasa Pariwisata, (Jakarta:Erlangga,2009).

Undang-undang Negara Republik Indonesia No.10, tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Lembar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Desain Strategis Dan Rencana Aksi (DSRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20018-2019

MAKNA KOMUNIKASI DALAM PERKULIAHAN NON TATAP MUKA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL WHATSAPP

Yunita Sari, Mediana Handayani

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

yunita.sari@dsn.moestopo.ac.id

Abstrak

Penyebaran Pandemi Covid 19 yang terus meningkat pada pertengahan bulan Maret 2020 terutama di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya membuat pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka maka Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melaksanakan perkuliahan non tatap muka melalui internet, dengan memanfaatkan aplikasi tertentu, dalam penelitian ini, menggunakan aplikasi WhatsApp (WA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna komunikasi dalam perkuliahan non tatap muka menggunakan media sosial Whatsapp. Teori yang digunakan antara lain teori komunikasi kelompok, teori new media dan komunikasi virtual, paradigma konstruktivis, dan metode fenomenologi, teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan dokumentasi, teknik analisis data kualitatif fenomenologi. Kesimpulan dari penelitian ini, Komunikasi melalui perkuliahan non tatap muka dimaknai dapat menjalin interaksi yang baik, terbangun relasi dan pola komunikasi serta fungsi komunikasi berjalan dengan baik, namun masih dimaknai kurang dalam mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan, seperti pemahaman yang komprehensif terhadap materi perkuliahan, kerena mahasiswa masih merasa bahwa komunikasi secara tatap muka lebih bermakna, dibanding melalui perantara media WA. Melalui komunikasi tatap muka, lebih terlihat gesture, respon dan interaksi serta relasi yang kuat, dibandingkan melalui komunikasi virtual.

Kata kunci : makna komunikasi, whatsapp

Abstract

The spread of covid 19 pandemic that continued to increase in mid-March 2020, especially in DKI Jakarta Province and surrounding area, led the government to set a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). With conditions that are not possible for face-to-face learning, the University's Master of Communication Science Program Prof. Dr. Moestopo (Religious) conducts non-face-to-face lectures over the internet, utilizing certain applications, in this study, using whatsapp (WA) application. This research aims to find out the meaning of communication in non-face-to-face lectures using Whatsapp social media. Theories used include group communication theory, new media and virtual communication theory, constructivist paradigm, and phenomenological method. The conclusion of this study, Communication through non-face-to-face lectures is defined as good interaction, relationship building and communication patterns and communication function goes well, but still interpreted less in achieving the expected communication goals, such as a comprehensive understanding of lecture materials, that students still feel that face-to-face communication is more meaningful, than through WA media intermediaries. Through face-to-face communication, more visible gestures, responses and interactions and strong relationships, than through virtual communication.

Keywords : meanings of communication, whatsapp.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 mengubah segalanya, termasuk pola dan tatanan kehidupan masyarakat dunia. Pola hidup bersih, tatanan berkomunikasi, pergaulan, pendidikan, serta pemanfaatan media baru, yaitu Internet. Seiring dengan penyebaran Pandemi Covid 19 yang terus meningkat pada pertengahan bulan Maret 2020 terutama di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan sekolah negeri maupun swasta dan perguruan tinggi negeri maupun swasta juga ditutup, dan diliburkan., melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Situasi dan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk pembelajaran/perkuliahian tatap muka maka Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melaksanakan perkuliahan non tatap muka melalui internet, dengan memanfaatkan aplikasi tertentu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, dan media sosial WhatsApp. Penelitian ini memilih , WhatsApp karena dari segi pendaftaran, penggunaan, dari segi fitur, konten, format penggunaan lebih mudah jika dibandingkan dengan Twitter, Facebook, dan Instagram. Isi dari pesan tidak terbatas dan dapat mengirim gambar, stiker, file, dan bisa melakukan video call.

Berkomunikasi dengan menggunakan media baru dalam interaksinya dapat berupa komunikasi antar individu, atau dapat juga menggunakan komunikasi kelompok (group) menurut Morissan, (2009: 141) adalah proses sebagai instrumen yang digunakan kelompok untuk mengambil keputusan dengan menekankan hubungan antara kualitas komunikasi dan kualitas keluaran (output) kelompok. Komunikasi kelompok berfungsi dalam sejumlah hal yang akan menentukan atau memutuskan hasil- hasil yang dicapai kelompok. Kelompok atau komunitas adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Menurut Kertajaya Hermawan (2008: 34) kelompok adalah beberapa orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah kelompok terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota kelompok tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Dalam konteks ini, proses komunikasi pada perkuliahan non tatap muka ini, dilakukan antara dosen, dengan mahasiswa dalam satu kelas (kelompok). Penelitian ini menyoroti Bagaimana makna komunikasi dalam perkuliahan non tatap muka dengan menggunakan media sosial whatsapp?

METODE

Penelitian yang berjudul makna komunikasi dalam perkuliahan non tatap muka dengan menggunakan media sosial whatsapp ini, menggunakan paradigma konstruktivis, yaitu paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena

dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah consensus (Mulyana: 2003)

Penelitian dilakukan pada bulan April-Juli 2020, dengan informan penelitian mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi semester 2 angkatan 2019, khususnya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif sebanyak 7 orang. Metode penelitian yang dipilih adalah metode fenomenologi, yaitu untuk memahami bagaimana pengalaman responden mengenai proses perkuliahan non tatap muka sehingga ditemukan struktur inti atau pusat di balik pengalaman responden terhadap suatu fenomena.

Selain itu, sifat pendekatan fenomenologi yang sangat mengedepankan *individual difference* (perbedaan individual) merupakan kelebihan fenomenologi dibandingkan dengan bentuk lainnya. Pendekatan fenomenologi menangkap fenomena kebenaran sesuatu itu terpancar dari objek yang diteliti (Arikunto,2013:3).

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah FGD (*focus group discussion*) secara online , wawancara secara online, dengan memanfaatkan email. dan observasi. Untuk memperoleh data dilapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti,

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif interaktif, mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman* dan *Spadley, Miles and Huberman*, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh (Hadi,Haryono,2005:135) Aktivitas dalam analisis data terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan , meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, pengalaman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan non tatap muka menggunakan media Whatsapp, mereka memaknai komunikasi dilihat dari :

1. Proses Interaksi Melalui WA

Komunikasi dan interaksi yang dilakukan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial WA, selama masa pandemi Covid-19 ini dinilai efektif oleh informan penelitian, Senada dengan hal tersebut, interaksi dinilai cukup efektif untuk bertukar informasi, dan pesan, dan memperoleh feedback yang baik melalui WA. Artinya, proses komunikasi timbal balik (interaksi) antara dosen dan mahasiswa masih berjalan baik, mahasiswa dan dosen saling memberikan respon positif terkait pembelajaran, mengirim materi, penugasan, diskusi dan lain-lain .

2. Tujuan Komunikasi

Tujuan komunikasi melalui wa, ternyata dinilai tidak sepenuhnya tercapai oleh setiap mahasiswa, karena berbagai kendala. Hal ini dikemukakan oleh beberapa informan penelitian, Mereka merasa bahwa tujuan komunikasi kurang tercapai karena terkendala media, kurang kedekatan fisik dan kebersamaan, kurang responnya antar anggota kelompok WA, sehingga komunikasinya dinilai tidak tercapai.

3. Fungsi Komunikasi

Fungsi komunikasi dikaitkan dengan perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka dianggap memengaruhi fungsi komunikasi secara umum antar mahasiswa dengan pengajar. Perbedaan jarak dan fisik, dengan memanfaatkan media WA seringkali terkendala oleh hambatan teknis, sehingga fungsi komunikasi berkurang. Namun, ada juga informan yang menilai bahwa fungsi komunikasi tidak terganggu, walaupun terdapat perbedaan jarak fisik, antara mahasiswa dan dosen pengajarnya, komunikasi masih dapat berjalan dengan baik.

Selama ini, perkuliahan non tatap muka (secara online) dengan memanfaatkan media WA, dengan adanya jarak fisik, ada yang menilai sangat memengaruhi fungsi komunikasi, namun ada pula yang menilai tidak memengaruhi fungsi komunikasi, karena proses komunikasi masih dapat berjalan lancar dan baik antara dosen dan mahasiswa, sehingga proses pembelajaran masih terbilang efektif.

4. Relasi Komunikasi

Relasi komunikasi yang terjadi antar mahasiswa, dan antara dosen bersama mahasiswa, dinilai tetap terjalin baik. Selama perkuliahan berlangsung, relasi/ hubungan antar mahasiswa menjadi semakin intens karena banyak hal yang didiskusikan, baik terkait materi perkuliahan, ataupun penugasan, saling bertanya satu sama lain, dan membantu antar mahasiswa, bila kiranya ada hal yang kurang dimengerti terkait materi dan tugas, maka mahasiswa akan bertanya kepada dosen, dan dosen akan menjelaskan. Sehingga media WA tidak mengubah relasi antar mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan dosen.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa media perkuliahan melalui WA mengubah relasi, baik antar mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan dosen.

Relasi/ hubungan komunikasi tentu saja dapat memengaruhi komunikasi. Hubungan komunikasi antar kelompok, hubungan komunikasi tatap muka dikelas, yang biasanya dilakukan, tergantikan dengan komunikasi dengan menggunakan media WA. Mahasiswa menilai bahwa komunikasi tatap muka lebih memberikan pengaruh positif, dibandingkan dengan komunikasi bermedia.

PEMBAHASAN

Maraknya kecanggihan teknologi menempatkan posisi pemakai agar bijak dalam penggunaannya. Pembelajaran/perkuliahan non tatap muka yang baru aja diterapkan di Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi saat pandemi Covid-19 ini, sebenarnya belum sepenuhnya sistem pembelajaran online. Namun, Sistem pembelajaran ini dapat dituangkan dalam *e-blended learning* yang merupakan kajian perpaduan teknologi dan komunikasi yang menarik untuk ditelusuri berdasarkan fungsi media sebagai pembelajaran tersebut. Penggunaan yang tepat dan positif merupakan keputusan bijak dalam penggunaan serta pemanfaatan

teknologi. Adanya kemajuan bidang teknologi memudahkan dalam pembelajaran, penyaluran pesan melalui media yang tepat dan cepat mulai digemari berbanding terbalik dengan masa terdahulu dimana saat ini semua dapat terakses dengan mudah dan cepat sehingga pemanfaatan yang tepat sangat terasa bermanfaat terutama dalam dunia perkuliahan.

Awal diterapkan perkuliahan online, sebagian dosen masih memanfaatkan media WA sebagai media pembelajaran. Kemudian berkembang dan bervariasi, ada yang menggunakan aplikasi Zoom, Talk Fusion, Google Meet, dan sebagainya sebagai media mengajar online. Kini telah berkembang berdasarkan kesepakatan, kampus menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk media perkuliahan online nya. Namun penelitian ini masih meneliti dan menganalisis media pembelajaran/ perkuliahan non tatap muka menggunakan media WA, sebagai media komunikasi antara dosen dan kelompok mahasiswa di kelas masing-masing mata kuliah.

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Sedangkan media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Dalam pembelajaran, media memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar. Hubungan komunikasi antara dosen dan mahasiswa akan lebih efisien jika menggunakan media. Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus bisa dipergunakan sebagai media di antaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan, dan suara yang direkam. Kelima bentuk stimulus ini akan membantu peserta didik. Namun demikian, tidaklah mudah mendapatkan kelima bentuk ini dalam satu waktu atau tempat. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada peserta didik. Selain itu media juga harus merangsang peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar (Rusman, 2013 : 61). Ada lima jenis media yang dapat digunakan

dalam pembelajaran, yaitu Rusman. 2013 : 62) : 1. Media Visual, adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan yang terdiri dari atas media yang diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan yang biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak. 2. Media Audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contoh dari media audio ini adalah program kaset suara dan program tape. Media Audio-Visual, yaitu media yang merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar. Contoh dari media audio-visual adalah program video /televise dan program slide suara (sound slide). 4. Kelompok Media Penyaji, media ini sebagaimana diungkapkan Donald T.Tosti dan John R.Ball dikelompokkan ke dalam tujuh jenis, yaitu : (a) kelompok kesatu ; grafis, bahan cetak, dan gambar diam, (b) kelompok kedua ; media proyeksi diam, (c) kelompok ketiga ; media audio, (d) kelompok keempat ; media audio, (e) kelompok kelima ; media gambar hidup/ film, (f) kelompok keenam ; media televise, dan (g) kelompok ketujuh ; multimedia. 5. Media objek dan media interaktif berbasis komputer. Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sangat memengaruhi kehidupan, terlebih dalam teknologi media komunikasi yang memudahkan kita untuk berbagi pesan dan informasi. Hal ini berkembang sangat cepat dan pesat dari tahun ke tahun, salah satunya penggunaan media telepon yang telah mengalami proses peralihan dimana saat ini kecenderungan masyarakat ingin memiliki media yang serba efisien baik dari segi bentuk dan waktu. Maka penggunaan handphone atau telepon genggam adalah solusi dari hasil inovasi terkemuka yang kita temui pada masa sekarang. Dengan penggunaan handphone ini maka aplikasi serta fitur ikut mengalami peralihan yang tetap menjaga fungsi utama dari media tersebut sebagai sarana komunikasi. Banyak sekali fungsi dan kegunaan handphone ini dalam membantu kita dalam berbagi pesan dan informasi baik untuk pribadi, pekerjaan ataupun untuk keluarga.

Teori new media atau lebih sering disebut sebagai media konvergensi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai alat ukur atau pendukung adalah teori media baru. Peneliti menganggap teori ini relevan dengan keberadaan media sosial yang merupakan pendatang baru dalam ranah media. Media baru adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai “media baru” adalah digital, bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif dan tidak memihak. Beberapa contoh dapat berupa internet, website, komputer multimedia, permainan komputer, CD-ROMS, dan DVD. Media baru bukanlah televisi, film, majalah, buku, atau publikasi berbasis kertas.

Sesuai dengan rumusan masalah yaitu pemaknaan komunikasi mahasiswa dalam perkuliahan non tatap muka lewat whatsapp, merupakan teknik pembelajaran menggunakan media baru. Dalam teori media baru, terdapat dua pandangan, pertama yaitu pandangan interaksi sosial, yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Sedangkan pendekatan kedua yaitu pandangan integrasi sosial, yang merupakan gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki, khususnya dalam proses pembelajaran non tatap muka.

“Kami memiliki kualitas dan interaksi komunikasi yang baik, kami memiliki grup whatsapp tersendiri sehingga bisa membahas tiap materi pembelajaran” (Adi Nugroho)

Bila dilihat keterkaitan pembelajaran dengan kecanggihan dunia komunikasi saat ini ada kesesuaian konsep adalah teori *blended e-learning* dimana secara etimologi istilah *blended learning* terdiri dari dua kata yaitu *blended* dan *learning*. Kata *blend* berarti “campuran, bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik” (Collins Dictionary), atau formula suatu penyesuaian kombinasi atau perpaduan (Oxford English Dictionary) (Heinze and Procter, 2006 : 236). Sedangkan *learning* memiliki makna umum yakni belajar, dengan demikian seintas

mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran, atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya. Apa yang dicampurkan? *Conception of Blended Learning – adapted from Heinze and Procter (2004)* Menurut Sharpen dalam Rusman mengatakan karakteristik Blended Learning adalah : 1. Ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar, melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. 2. Transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. 3. Pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Jika dikaji secara terminologis maka *blended e-learning* menekankan pada penggunaan internet seperti pendapat Rosenberg (2001) menekankan bahwa *blended e-learning* merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan Cambell (2002), Karmaga (2002) yang intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat *blended e-learning*. Lebih lanjut Onno W. Purbo (2002) menjelaskan bahwa istilah “e” atau singkatan dari elektronik dalam *blended e-learning* digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet (Rusman, 2017 : 249-250). Bila dilihat dari perspektif komunikasi, pembelajaran serta teknologi saling berkaitan diantara ketiga hal tersebut sehingga dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa metode pembelajaran dapat digunakan sebagai penyalur informasi mengenai perkuliahan dengan perantara kecanggihan teknologi sebagai medianya. Adanya whatsapp sangat membantu kehidupan dari segi waktu, efisiensi, serta ekonomis karena pemakaiannya yang sangat praktis seperti mengirim pesan yang langsung terhubung melalui sistem internet dari smartphone langsung tersampaikan pesan yang diberikan. Bila ada gambar yang akan dikirim sangat memungkinkan karena kualitas gambar yang bagus dari aplikasi ini dapat dengan mudah diterima oleh orang yang dituju. Bahkan video juga sangat mudah untuk mengirimnya hingga dokumen seperti *file word* berupa tugas dari dosen tidak membuang waktu harus kirim melalui email tetapi cukup dari handphone sudah bisa memungkinkan pengiriman tersebut langsung diterima oleh dosen yang bersangkutan. Hal ini memudahkan kinerja dosen selain memberikan materi

pengajaran dikelas tetapi untuk evaluasi belajar mengajar maka dibutuhkannya pemberian tugas dari dosen dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti whatsapp sangat memudahkan proses belajar mengajar. Tidak hanya itu dalam aplikasi ini juga tidak merepotkan si penerima pesan harus menyimpan gambar yang dikirim oleh si komunikatornya dengan sistem otomatis langsung tersimpan.

Bentuk komunikasi dengan memanfaatkan media WA ini merupakan salah satu bentuk *blended e-learning*, yang diterapkan pada kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi semester 2, pada mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif. Sesuai dengan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *Adaptive structuration Theory*, yang berfokus pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam suatu kelompok atau organisasi (Littlejohn,dkk, 2017). Teori ini menemukan fakta bahwa produk teknologi informasi dan komunikasi yang sama dapat dimanfaatkan secara berbeda oleh tiap kelompok atau organisasi. Teori kedua, yaitu teori kepribadian kelompok diketahui bahwa teori kepribadian kelompok atau disebut juga dengan *group syntality theory* adalah sebuah teori yang menitikberatkan pada interaksi kelompok yang berdasarkan pada dimensi kelompok serta dinamika kepribadian. Teori kepribadian kelompok atau *group syntality theory* adalah salah satu dari teori-teori sifat atau trait theory yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengkaji kepribadian manusia. Dalam kerangka kerja pendekatan teori sifat, sifat kepribadian manusia didefinisikan sebagai pola-pola kebiasaan perilaku, pikiran, dan emosi yang diwujudkan dalam berbagai situasi. Beberapa ahli tercatat telah mengembangkan teori sifat ini, sebut saja Gordon Allport, Raymond Bernard Cattell, dan Hans Eysenck (dalam Arni, Muhammad; 2005)

Dalam konteks komunikasi kelompok, teori sifat berperan besar dalam mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dari segi psikologi komunikasi, yang dimaksud dengan keefektifan kelompok adalah pencapaian tujuan kelompok melalui berbagai tindakan kooperatif. Dengan kata lain, setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Fitur dan manfaat sebuah teknologi akan terus digunakan selama anggota kelompok terus menggunakannya. Pemilihan teknologi yang digunakan pun dipengaruhi oleh

iklim dan kepemimpinan kelompok. Melalui penelitian ini, kelompok mahasiswa melakukan interaksi antar anggota kelompok, dan anggota kelompok yang tergabung dalam grup WA melakukan interaksi dengan dosen dalam pembelajaran/kuliah. Mereka memaknai interaksi komunikasi yang dilakukan melalui WA berjalan baik, namun ada juga yang memaknai interaksi berjalan tidak seharusnya, karena terhalang media, sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai, namun dapat berjalan sesuai fungsi komunikasinya. Relasi antar anggota kelompok dan dengan dosen dimaknai secara baik, karena hubungan dapat berjalan secara timbal balik, dan sesuai seperti tujuan komunikasi yang diharapkan dalam proses perkuliahan online dengan menggunakan WA.

Urgensi peranan teknologi dalam proses masifikasi informasi terjadi ketika hasil teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas. Sehingga hadirnya media baru (*new media*) memberi alternatif bagi individu, kelompok maupun masyarakat dalam mencari dan memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk memenuhi kebutuhannya. (Andrew; 2006) Penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet yang sudah memiliki berbagai aplikasi seperti media sosial, merupakan salah satu media dimana para penggunanya dapat mencari informasi dan saling berkomunikasi. Seperti diketahui ragam media sosial yakni adalah facebook, twitter, line, bbm, whatsapp, instagram, path, ask.fm, linkedin, snapchat dan beberapa media sosial yang lain. Hermawan (2009) menyatakan bahwa dalam penggunaan media sosial juga dapat dengan mudah menciptakan suatu forum dimana individu satu dengan yang lain dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran satu sama lain. Dalam hal ini akan sangat mudah membuat individu berkomunikasi dan berkomentar tentang berbagai topik maupun kasus yang dibahas oleh individu lain. Individu juga dapat membangun asumsi, emosi dan kepercayaan melalui komentar maupun sudut pandang maupun pemikiran individu lain dalam media sosial, hal ini memungkinkan kita dapat secara reaktif berkomentar maupun berkesimpulan.

McQuail (2016) mengatakan aspek mendasar dari perkembangan media baru ini adalah digitalisasi, yaitu pesan yang konstruksi dalam bentuk teks, kemudian diubah menjadi serangkaian kode-kode digital dan dapat diproduksi, dikirimkan

pada penerima maupun disimpan. Dan konvergensi , yaitu penyatuan semua bentuk dan fungsi media yang selama ini berdiri sendiri-sendiri baik dalam proses organisasinya, distribusi, penerimaan, regulasi, maupun fungsi sebagai sumber informasi dan hiburan.

Pada dasarnya modal teori komunikasi kelompok ini, terdiri dari empat kegiatan belajar yaitu prinsip-prinsip dasar komunikasi dalam suatu kelompok (*group communication*) untuk memahami komunikasi dalam kelompok, pendekatan teoritis komunikasi kelompok dan kegiatan belajar terakhir berkaitan dengan bahasan mengenai beberapa perspektif dalam penelitian komunikasi kelompok. Ada empat elemen yang tercakup dalam definisi di atas, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, maksud atau tujuan yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan fungsi terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok dan para anggota kelompok itu sendiri.

Memanfaatkan media WA sebagai salah satu media pembelajaran non tatap muka merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok. Yaitu pembelajaran dilakukan melalui grup WA, antara mahasiswa dan dosen, demikian sebaliknya.

Pembelajaran non tatap muka, dengan memanfaatkan media komunikasi WA, juga merupakan salah satu bentuk komunikasi virtual, dimana sekelompok orang dalam sebuah komunitas dunia maya, menggunakan kata-kata dilayar untuk berkomunikasi dalam wacana intelektual. Komunitas ini lahir sebagai dampak positif dari internet yang merupakan produk teknologi komunikasi. Maka, jika seseorang aktif terhubung ke internet dengan segala aktivitas seperti browsing, chatting hingga mengikuti forum diskusi, maka secara otomatis akan masuk dalam komunitas virtual tersebut.

Termasuk dalam proses pembelajaran non tatap muka ini, merupakan sebuah komunitas virtual, dimana para anggota kelompok yang terlibat didalamnya (mahasiswa) melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi virtual. Namun mereka menilai bahwa proses komunikasi virtual ini dinilai dapat memberikan keuntungan

baik bagi mahasiswa dan dosen bisa lebih leluasa dan tidak terlalu formal, kerugiannya adalah pengenalan antara pengajar kepada mahasiswa pasti akan berkurang karena kurangnya melihat ciri-ciri fisik.

Komunikasi non tatap muka dalam proses pembelajaran melalui WA, yang merupakan bentuk komunikasi virtual ini, juga dinilai kurang menguntungkan, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan penelitian:

“Menurut saya kerugian. Komunikasi non tatap muka melalui WA memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan perkuliahan secara tatap muka. Dimana saat menggunakan WA, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik karena adanya keterbatasan komunikasi tersebut. WA grup yang hanya bisa mengirimkan teks, file, dan visual, tidak dapat mengalahkan kekuatan komunikasi yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman mahasiswa akan materi perkuliahan. Karena efektifnya kegiatan perkuliahan dilakukan tidak hanya berdasarkan teks dan visual semata, tetapi membutuhkan pola interaksi yang juga memunculkan adanya komunikasi langsung secara dua arah. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk dapat memahami materi perkuliahan hanya melalui komunikasi yang berdasarkan teks semata, pasti dibutuhkan tanya jawab secara langsung.” (Arso)

Sebanyak- banyak keuntungan dalam komunikasi virtual, ataupun komunikasi massa, ternyata tidak dapat menggantikan kekuatan komunikasi tatap muka, dimana proses komunikasi dalam pembelajaran dapat terlihat langsung, dan memperoleh feedback yang langsung pula. Dibandingkan dengan komunikasi melalui media WA.

Melalui komunikasi virtual memang dapat terjadi interaksi yang baik, walaupun tujuan komunikasi belum sepenuhnya terpenuhi, namun masih dapat berfungsi dan dapat membangun relasi serta membuat pola komunikasi yang baik, dalam kelompok/grup WA melalui proses perkuliahan non tatap muka. Tetapi, ternyata, komunikasi virtual tidak dapat mengubah makna komunikasi tatap muka, yang dirasa dapat membuat mahasiswa lebih membangun relasi dan tujuan komunikasi yang lebih jelas.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pemanfaatan whatsapp smartphone memiliki keterkaitan bukan hanya dalam dunia komunikasi semata tetapi juga berkaitan dengan kecanggihan teknologi dan sistem pembelajaran khususnya dalam dunia perguruan tinggi. Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang pengguna whatsapp merasakan kegunaannya selain untuk chat atau obrolan dengan sesama teman tetapi juga efektif bila digunakan sebagai sarana pembelajaran sebagai sarana pemberian materi ataupun pengumpulan tugas melalui aplikasi di smartphone mereka.

Komunikasi melalui perkuliahan non tatap muka dimaknai dapat terjalin interaksi yang baik, terbangun relasi dan pola komunikasi serta fungsi komunikasi berjalan dengan baik, namun masih dimaknai kurang dalam mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan, seperti pemahaman yang komprehensif terhadap materi perkuliahan, kerana mahasiswa masih merasa bahwa komunikasi secara tatap muka lebih bermakna, dibanding melalui perantara media WA. Melalui komunikasi tatap muka, lebih terlihat gesture, respon dan interaksi serta relasi yang kuat, dibandingkan melalui komunikasi virtual.

SARAN

Secara akademis diharapkan dilakukan penelitian lanjutan terkait tema penelitian, yang menggali lebih dalam tentang proses komunikasi pembelajaran/ perkuliahan non tatap muka dengan menggunakan media online, dapat juga dalam bentuk penelitian survey.

Secara praktis, diharapkan kepada pihak penyelenggara perkuliahan yaitu Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi agar lebih memantapkan dan mengembangkan pembelajaran/ perkuliahan non tatap muka melalui aplikasi yang lebih komprehensif, seperti microsoft team saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi dan Haryono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka. Setia.
- Arikunto, S. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta.
- Kertajaya, Hermawan. 2008. *Arti komunitas* :Gramedia Pustaka.
- Littlejohn, Stephen W., dkk, 2017. *Theories of Human Communication* : Eleventh Edition. Illinois : Waveland press, Inc.
- Morissan, M.A. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*. Bandung : Ghalia Indonesia
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Astuti, Yanti Dwi. "DARI SIMULASI REALITAS SOSIAL HINGGA HIPER-REALITAS VISUAL: Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace". *Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*. (Oktober, 2015), hal 1618. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/1084/988>. (Akses 19 April 2020).
- Doni, Fahlepi Roma. "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja". *IJSE –Indonesian Journal on Software Engineering*. (2017), hal 16. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/view/2816/1838>. (Akses 19 April 2020).
- Andjani, A. "PENGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI WHATSAPP TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA KARYAWAN". (April, 2018). Hal 43. <https://www.unida.ac.id/ojs/JK/article/view/1211/959>. (Akses 19 April 2020).

Munandar, Harris. "Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial". (2016). Hal 427.

<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/viewFile/3270/pdf>.

(Akses 20 April 2020).

Suparno, Basuki Agus., Sosiawan, Edwi Arif., dan Tripambudi, Sigit. (2012). *Computer Mediated Communication Situs Jejaring Sosial dan Identitas Diri Remaja*. Jurnal Ilmu Komunikasi Yogyakarta Vol. 10, No 1, (Januari April 2012), hal. 1-104.

<https://pakarkomunikasi.com/teori-kepribadian-kelompok>

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) DI SMK NEGERI 20 JAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Aberar Guridno¹; Angga Sulaiman²; Shalilha³

Public Administration, Faculty of Social Science and Politic,
Universitas Nasional^{1,2}

e-mail: Angga_nelwan@yahoo.com¹; shaliha6690@gmail.com²

Abstract

The Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) is a strategic program to provide access for DKI Jakarta residents from the underprivileged community to receive a minimum education until completing SMA or SMK with total funding from the DKI Jakarta Province APBD funds. The purpose of KJP Plus, as stated in the DKI Provincial governor regulation Number 15 of 2015 Article 3, that KJP Plus aims to: 1) Support the implementation of the 12 Year Compulsory Education; 2) Increasing access to education services fairly and equitably; and 3) Ensuring certainty of access to education services and improving the quality of education outcomes. This study aims to explore applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) program at SMKN 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic. This research uses qualitative or descriptive methods. Data collection was carried out utilizing observation, interviews, and documentation. The data analysis used was data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed Good Corporate Governance (GCG) in the Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus). Had implemented by State Vocational High School (SMKN 20) during

Covid-19 because it implemented the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Keywords: Implementation, Good Corporate Governance, Funding, Education.

Introduction

Indonesia had ranks 4th in terms of the largest population and the country with the largest archipelago in the world. One way to overcome high population growth is to increase compulsory education in schools public (Shanti et al., 2016; Larasati & Nurhadryani, 2012). Education is a basic need that every individual must meet. Indonesia has determined that education is the right of every its citizens. The sound of Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states: that “every citizen has the right to education”. Education is a long-term investment that must be continuously nurtured and maintained (upgrade). Education is guidance obtained from adults to students’ development of the child to reach maturity and aim for the child to be able to carry out their life tasks without the help of others. So, the role of education is enormous in realizing a perfect human being and independent and being a noble and beneficial human being for the environment (Abdullah & Page, 2009; Afriansyah, 2017; Ahmed & Hamdan, 2015). Education considerably contributes to the country’s progress and is a vehicle for translating constitutional messages and building a national character (nation character building). The low level of education is wrong a factor of poverty in Indonesia.

Based on the problems in the low level of education is one of the factors of poverty in Indonesia that affect the dropout rate in DKI Jakarta, the Governor of the DKI Jakarta Provincial Government, Joko Widodo, declared a program that seeks to reduce the burden on the poor in gain access to education with the issuance of the Cost Assistance program Personal Education through the Jakarta Smart Card. In the current era of Anies Baswedan’s leadership, KJP is optimized to become a Jakarta Card Smart Plus (KJP Plus). This change promises a broader audience, including participants of “Kejar Paket”, madrasah, and courses. For families who can’t afford KJP Plus too can be cashed. The Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus)

is a strategic program for provide access for residents of DKI Jakarta from the underprivileged community to receive a minimum education up to the completion of high school / vocational school with fully funded from the DKI Jakarta Provincial APBD funds. In 2020 Indonesia experienced a disaster, namely the COVID-19 virus outbreak. COVID-19 (coronavirus disease 2019) is a new type of disease caused by a virus from group of coronaviruses, namely SARS-CoV-2, which is also often called the Coronavirus. In Indonesia, the government implements a large-scale social restriction (PSBB) policy to suppress the spread of this virus.

The DKI Provincial Government, through the Education Office (Disdik), decided to relax or provide relief regarding Card payment plans Jakarta Smart Plus (KJP Plus) during the massive social restriction (PSBB). Through With this relaxation, recipients can withdraw all assistance at KJP Plus during the pandemic COVID-19 to make it easier for KJP Plus recipients to use the funds provided. In the COVID-19 situation, the government took the initiative to combine routine funds and periodic funds every month and temporarily remove the obligation to disburse non-cash. Can use recurring costs for food, health, and educational needs to support distance learning communication costs. Then, routine funds (which usually fall in June and are used to meet school needs instead of cash), which are typically paid every six months, are currently abandoned and paid monthly. Thus, the notional amount to be paid every month is Rp. 250,000 for SD, Rp. 300,000 for SMP, Rp. 420,000 for SMA, Rp. 450,000 for SMK, and Rp. 300,000 for PKBM. In addition, during the COVID-19 pandemic, the DKI Jakarta Disdik expressed concern for the health and safety of KJP Plus recipients to eliminate cheap food costs temporarily. Instead, the DKI Jakarta Provincial Government provides a free social assistance program during the PSBB period. Therefore, the funds in KJP Plus were initially used to buy cheap necessities that could be used for other more urgent needs (Afriansyah, 2017; Pertiwi & Yuningsih, 2016)

This policy started in May, only during the PSBB period. Then there are additional funds for students who have just graduated from high school / vocational school. KJP Plus recipients who have entered category twelve or plan to continue to university level will still receive a transitional fund of IDR 500,000 per person to congestion at DKI bank service offices and ATMs. The allocation

of KJP Plus funds for the first phase of 2020 is based on a schedule adjusted for each level of education. For KJP Plus SD / SDLB / MI starting May 15, 2020. KJP Plus SMP / SMPLB / MT / PKBM beginning May 18, 2020. KJP Plus SMA / SMALB / beginning May 20, 2020, MA / SMK. As well as payment of transfer funds or other fees for students in class XII will also be held in May 2020. KJP Plus recipients who already have the “JakOne” Mobile application are also advised to monitor funds and transactions received through their cellphones. The government plays an essential role in protecting the public to participate in improving education in Indonesia. However, in this case, especially in the Jakarta Smart Card Plus (KJP Plus) program, good governance has not been implemented for the community's welfare. Good governance is needed to goals and ideals of the nation and state can be achieved. Corporate Governance (English: corporate governance) is a series of processes, customs, policies, rules, and institutions that influence the direction, management, and control of a company or corporation.

Corporate governance includes the relationship between the stakeholders involved and the objectives of the company's management. The main parties in corporate governance are shareholders, management, and the board of directors. Other stakeholders include employees, suppliers, customers, banks and other creditors, regulators, the environment, and the wider community. In the implementation of a policy, of course, there are various kinds of problems that exist, this can be seen based on the findings in the field along with the implementation of the Jakarta Smart Card Plus (KJP Plus) program, which is still experiencing some obstacles or problems. The weakness of this regulation is the lack of supervision from the KJP Plus provider and the provision of cash to the KJP Plus recipient community. The absence of supervision from the government makes the community free to use KJP Plus as they wish. In addition, there is also the provision of cash to KJP Plus recipients, the cash in the process of purchasing goods will not be caught by the government because it will not be detected in detail, it will be much different if the government uses a computer system or credit or debit, from the machine itself it will be caught if people buy goods that do not fit and will be easy to follow up. In addition, there are still inappropriate targets and misuse of Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) funds, especially during the Pandemic.

Literature review

Corporate governance is the relationship between the stakeholders, objectives, company's management and the board of directors. Other stakeholders include employees, suppliers, customers, banks and other creditors, regulators, the environment, and the wider community (Winarno, 2012; Abidin, 2012; Mutmainah, 2015). Various kinds of problems exist in implementing a policy; this can be seen based on the findings in the field along with the performance of the Jakarta Smart Card Plus (KJP Plus) program still experiencing some obstacles or problems. The weakness of this regulation is the lack of supervision from the KJP Plus provider and the provision of cash to the KJP Plus recipient community. The absence of charge from the government makes the community free to use KJP Plus as they wish. In addition, a provision will cash to KJP Plus recipients; the government will not catch the money in purchasing goods because it will not be detected in detail. It will be much different if the government uses a computer system or credit or debit; from the machine itself, it will catch if people buy goods that do not fit and will be easy to follow up. In addition, there are still inappropriate targets and misuse of Jakarta Smart Plus Card (KJP Plus) funds, especially during the Pandemic. According to Abidin (2012) and Mutmainah, (2015); the theory of GCG principles as indicators is the same as stated in the Decree of the Minister of SOEs number 117/2002 regarding GCG, namely: 1) Transparency; openness in implementing the decision-making process and transparency in presenting material and relevant information regarding effectiveness; 2. Accountability; Clarity of function, implementation and accountability of the company's organs so that the company's management is carried out effectively; 3. Responsibility; Conformity companies of the management to prevailing laws, regulations and corporate principles; 4. Independence; a condition where the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not following the applicable laws and regulations and sound corporate principles; and 5. Fairness, justice and equality in fulfilling stakeholder matters that arise based on agreements and applicable laws and regulations (Hamdani, 2016; Mutmainah, 2015).

As long as the principles of Good Corporate Governance are applied correctly and correctly in local government systems and governance, GCG can be implemented

in local governments. GCG, as a concept of governance, is not an understanding but actually must be implemented in specific steps to benefit all parties with interest in the government. Good corporate governance (GCG) is a system that regulates and controls companies that create added value for all stakeholders (Hamdani, 2016). Two things are emphasized in this concept, first, the importance of the right of shareholders to obtain correct and timely information and, second, the company's obligation to make accurate, timely, transparent disclosure of all information on company performance, ownership and ownership. And stakeholders.

There are four main components needed in the concept of good corporate governance (Gras-Gil, 2016; Fitriyani et al., 2014; Sutedi, 2011; Kamran & Shah, 2014; Hamdani, 2016), namely fairness, transparency, accountability, and responsibility. These four components apply the principles of good corporate governance. Consistently proven to improve the quality of financial reports and can also become an obstacle to performance engineering activities that result in financial statements not reflecting the company's fundamental values. The concept of good corporate governance has just become popular in Asia. This concept has been relatively developed since the 1990s. GCG has been only known in the UK since 1992. Developed countries that are members of the OECD group (developed countries in Western Europe and North America) practiced in 1999. Good Corporate Governance is the art of directing and controlling an organization by balancing the needs of various stakeholders. Often involves resolving conflicts of interest between multiple stakeholders and ensuring that the organization is well managed, meaning that processes, procedures and policies are implemented following transparency and accountability (Paul & Godwin, 2011; Mutmainah, 2015; Hamdani, 2016). The direct benefits felt by the company by realizing the principles of good corporate governance are increased productivity and business efficiency. Another benefit is the increase in the company's operational capabilities and accountability to the public. In addition, it also minimizes the practice of corruption, collusion, and nepotism, as well as conflicts of interest. GCG can encourage organizational management that is more democratic (participation of many attractions), more accountable (accountability for every action), and more transparent and will increase confidence that the company can provide long-term benefits.

Method

This study uses a qualitative or descriptive method (Gunawan, 2013; Sugiyono, 2018), and the key informants are the Principal of SMK Negeri 20 Jakarta and Student Representatives of SMK Negeri 20 Jakarta. The primary informants are the Head of Subdivision for Administration at SMK Negeri 20 Jakarta and his staff, the Jakarta Smart Card Plus Program recipients at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 Pandemic. In this study, the author also uses the technique of determining the informant, namely Criterion sampling. In this study, the data collection techniques carried out by researchers are:

1. Observation; In this case, the observations made are research observations regarding the management of the Jakarta Smart Card management at the level for High School or Vocational High School at SMK Negeri 20 Jakarta in 2020.
2. FGD Interview research on the management of the Jakarta Smart Card management at the high school or vocational education level at SMK Negeri 20 Jakarta;
3. Documentation; In processing the data, the researchers used the validity and reliability test processing techniques. Test the validity and reliability of qualitative research with the data's truth so that the measuring instruments used are accurate and reliable. The author also uses the triangulation method in this study. The author uses different informants to check the truth of the information. In this study, the author uses source triangulation. Source triangulation is used to test the credibility of the data by checking the data obtained from several sources. The data that the author has analyzed produces a conclusion, then an agreement (member check) is requested with the different data sources.
4. According to the research problem, data and informants totaling ten people were chosen intentionally and randomly obtained in the field, then selected and described qualitatively. The data in the form of sentences are then interpreted to find out the meaning in it and know the relationship with the problem under study.

Results and Discussion

Transparency (Openness)

Transparency is openness in carrying out the decision-making process and transparency in conveying material and relevant information. In this dimension, the author uses interview techniques to determine how to apply the principle of transparency indicators in the KJP Plus program at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic. Based on interviews with the Principal of SMK Negeri 20 Jakarta, Mr. Bimo Suciono, SMK Negeri 20 Jakarta has an official website for information media students of SMK Negeri 20 Jakarta that they can access information quickly. In addition, the homeroom teachers also continually update every development regarding details about the KJP Plus program. Registration for the KJP Plus program is done online on the Website. Official KJP Plus. Then, the school only inputs data on KJP Plus recipients after being given a list of KJP Plus recipients from the DKI Jakarta Provincial Government in collaboration with the Education Operational and Personal Funding Service Center (P4OP). Registration for the KJP Plus program is done online at the KJP Plus Official Website. Then, the school only inputs data on KJP Plus recipients after being given a list of KJP Plus recipients from the DKI Jakarta Provincial Government in collaboration with the Education Operational and Personal Funding Service Center (P4OP). Based on the above explanation, the principle of transparency or openness in the KJP Plus program at SMK Negeri 20 Jakarta during the pandemic has been implemented well. Because conveying information about the KJP Plus program can be accessed quickly and received very clearly, accurately, and on time for students recipients of the KJP Plus program.

Accountability

The next dimension to measure the application of Good Corporate Governance (GCG) principles at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 period is Accountability or Accountability because Accountability is the implementation, clarity of functions and responsibilities of the company's organs, so that company management is carried out effectively. Based on the results of the interview with the Principal of SMK Negeri 20 Jakarta, Mr. Bimo Suciono, before the pandemic,

negligence in distributing KJP Plus often occurred who manipulate data such as not owning a private vehicle but having more than two personal vehicles. It isn't easy to control or know the truth by the school. However, during this pandemic, negligence in distributing KJP Plus will no longer occur because the system is entirely online, and the government is also collaborating with the Dukcapil and other institutions. Then the KJP Plus recipient data has been read by the procedure clearly and accurately.

Based on the explanation described above. The principle of accountability in the KJP Plus program at SMK Negeri 20 Jakarta during the pandemic has been implemented well. Due to negligence in distributing KJP Plus, it is no longer the case during this pandemic. It is different from before the pandemic that there was manipulation of data such as ownership of private vehicles that did not comply with the applicable terms and conditions. Some state that the prospective recipient does not have a personal car but has two private vehicles. Then, after the pandemic that changed the system to online, the negligence as above will no longer occur because the system can detect the data of prospective KJP Plus recipients at SMK Negeri 20 Jakarta. In addition, benefits programs are already being felt for recipients by using it to meet their basic daily needs and support the need to keep the online learning process from home.

Responsibility

In measuring the application of Good Corporate Governance (GCG) principles at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 period, the next aspect is a responsibility, namely conformity in company management to applicable laws and regulations and sound corporate principles. An interview with the Chief Executive of the KJP Plus program at SMKN 20 Jakarta was a change in the KJP Plus registration mechanism during the pandemic. The school only entered data after being given a list of KJP Plus recipients from the government to complete the requirements such as KK, ID card of the student's parents / I following the applicant's letter that has been made previously. Then after the school received an invitation letter to take the atm/account of the recipient of KJP Plus, the school informed through each homeroom in stages; for example, five people first and the

others waited. Before the pandemic, the KJP Plus data collection mechanism had to go through 8 steps. Willingly, prospective KJP Plus recipient's volunteer to register at the school. Second, schools conduct surveys or visits to future recipients' homes for a feasibility test. In this case, it is prone to negligence and data manipulation. For example, the prospective recipient uses a neighbor's house that looks less suitable, so the prospective recipient will likely fall into the category of KJP Plus recipients. Third, the determination of temporary recipient data by the school. After the school surveys the prospective recipient's house, the school determines the provisional recipient data with predetermined categories. Fourth, make a Certificate of Incapacity (SKTM) for future recipients. At this stage, prospective recipients must complete one of the KJP Plus program requirements by making an SKTM in their respective Urban Village. Fifth, prospective recipients complete the file through the school. At this stage, the prospective recipient must meet the documents through the school, such as the Family Card, Parent's ID Card, and other necessary files according to the conditions that have been determined. Sixth, verify the completeness of the file of the prospective recipient. At this stage, the school begins to sort and select the files of future recipients. Whether the prospective recipient is eligible or not eligible for the KJP Plus program, at this stage, the school decides. Seventh, submission of recipient data by the school. After the school determines the eligible recipients to receive KJP Plus, the school submits the data to the government. Eighth, the final data of the recipient is determined.

Meanwhile, the mechanism during the pandemic only goes through 4 stages: The Education Office announced data on temporary recipients from the DKI Jakarta Provincial Government's Integrated Data through schools. At this stage, the government determines the data on the temporary recipients; the school only inputs the information that the government has announced. After that, the school conveys to the prospective KJP Plus recipients through their respective homeroom teachers to complete the files needed in the KJP Plus acceptance process. Prospective recipients complete the file through the school. At this stage, future recipient's complete files such as KK and KTP Parents scanned and uploaded to the KJP Plus official website. In this mechanism, SKTM does not need to be used. Verify the completeness of the prospective recipient's file. At this stage, the government

cooperates with the Education Operational and Personal Funding Service Center (P4OP) and other institutions to select and determine whether or not prospective recipients are eligible to receive the KJP Plus program. The final data of the recipient is determined. After being determined by the government, the final recipient data is determined and given to the school to be submitted to the KJP Plus recipient. During the pandemic, the principle of responsibility or accountability in the KJP Plus program at SMK Negeri 20 Jakarta has been implemented well. With a more effective data collection mechanism, it is straightforward for KJP Plus recipients in the data collection process. In addition, it is more transparent because KJP Plus recipients can directly check on the KJP Plus official website.

Independency

In measuring Good Corporate Governance (GCG) at SMKN 20 Jakarta during the COVID-19 period, the next aspect is independence, which is a condition where the company is managed professionally without conflicts of interest and influence from any party that is not following applicable laws and regulations. Apply in SMKN 20 Jakarta must be organized independently with the right balance of power. No company organ will dominate other organs, and there is no intervention from other parties. Independence reflects an impartial attitude and is not under the influence of pressure of certain parties in making decisions and actions. Based on the results of interviews with the recipient of the KJP Plus program, namely Iqra Kalimasada, it can be seen that there is no external pressure or influence. All employees work professionally as in objective management decision making. Then, the implementation of a sound internal control system. Based on the interview results, it was also known that there was no influence or pressure from other parties at SMK Negeri 20 Jakarta. Everything works professionally. For example, when KJP Plus recipients want to get information regarding KJP Plus and ask their homeroom teacher and administrative staff, they will provide the required information regarding KJP Plus. So, there is no miscommunication between the school and KJP Plus recipients. Based on the explanation described, the principle of independence in the KJP Plus program at SMKN 20 Jakarta during the pandemic has been implemented well. Because all staff and employees at SMKN 20 Jakarta

work professionally, such as making management decisions that are carried out objectively. Then, the implementation of a healthy internal control system.

Fairness

In measuring the application of Good Corporate Governance (GCG) principles at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 period, the last aspect is fairness or fairness, namely fairness and equality in fulfilling stakeholder matters that arise on agreements and applicable laws and regulations. Based on the interviews with the implementer of the KJP Plus program at SMKN 20 Jakarta, Mr. Mursalih, it is known that there were still many KJP Plus recipients before the pandemic was not on target because the data collection mechanism was carried out through schools. However, once the system is updated online, no one uses fictitious data anymore. The government cooperates with Samsat, Dukcapil, etc., so that it is easier to detect data that has a private vehicle such as a car will automatically fall off by itself. Some created fictitious data before updating. They had a relative relationship with the RT/RW. Based on the interview results, it is known that the KJP Plus recipients at SMKN 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic were fair, thorough and on target. Judging from the friends who are KJP Plus recipients, those who can't afford it will get this program and vice versa if those who are already well off don't receive it. Based on the explanation described above, concluded principle of fairness or fairness in the KJP Plus program at SMKN 20 Jakarta during the pandemic has been implemented well. The updated system can automatically sort and determine whether or not KJP Plus recipients are eligible so that the KJP Plus recipients at SMKN 20 Jakarta during the pandemic are fair, thorough and on target.

Conclusion

Implementation of the Principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Jakarta Smart Plus Card Program (KJP Plus) at SMKN 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic, using the theory of Good Corporate Governance (GCG) principles that have five indicators according to Daniri (2014 :25) including transparency, accountability, responsibility, independence, fairness. So it can be concluded that the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Jakarta

Smart Plus Card Program (KJP Plus) at SMK Negeri 20 Jakarta during the COVID-19 pandemic has been implemented and implemented well. The author's suggestion in this case is to maintain the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the KJP Plus program at SMK Negeri 20 Jakarta and can be replicated in other schools. In addition, if there is no pandemic, it is hoped that the data collection mechanism for the KJP Plus program will still be carried out online, so as to avoid inaccurate targets for recipients of the KJP Plus program.

Reference

- Abdullah, A. and Page, M. (2009), "Corporate governance and corporate performance: UK FTSE 350 companies", *The British Accounting Review*, Vol. 42 No. 2, pp. 132-133
- Ahmed, E. and Hamdan, A. (2015), "The impact of corporate governance on firm performance: evidence from Bahrain Bourse", *International Management Review*, Vol. 11 No. 2, pp. 21-37
- Afriansyah, A. (2017), Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 No.1, p.55-68.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Mirdah, A. and Putra, W.E. (2014), "Effect of profit management on company performance with audit quality as moderator of moderate", *Dinamika Akuntansi Journal*, Vol. 6 No. 2 (in Bahasa)
- Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gras-Gil, E. (2016), "Investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: evidence from Spain", *BRQ Business Research Quarterly*, Vol. 19 No. 4, pp. 289-299

- Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory. SEMNAS FEKON
- Kamran, K. and Shah, A. (2014), "The impact of corporate governance and ownership structure on earnings management practices: evidence from listed companies in Pakistan", *Lahore Journal of Economics*, Vol. 19 No. 2, pp. 27-70
- Larasati, I. & Nurhadryani, Y. (2012), E-Government of Indonesian Demographic: Development Instrument and Evaluation of Indonesian Demographic Website, *Jurnal Ilmu Komputer Agri-Informatika*, Vol.1 No.1, pp.13-21
- Mutmainah. (2015). Analisis Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *EKSIS*, 10(2)
- Shanti, D., Fatchiya, A., & Susanto, D. (2016), Family Planning Volunteers Capacity in Extension in Palembang City, South Sumatera Province, *Jurnal Penyuluhan*, Vol.12 No.2, pp.144-155
- Sugiyono, S. (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika
- Paul, A., Friday, O. and Godwin, O. (2011), "Board composition and corporate performance: an analysis of evidence from Nigeria", *Management*, Vol. 2 No. 4, pp. 64-7
- Pertiwi, Y.M. & Yuningsih, T. (2016), Pentingnya Faktor Komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur.

PENGARUH EFEKTIVITAS APLIKASI "KEMBOJA SARI" TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KOTA SUKABUMI

Ahmad Muksin¹; Larisa Putri A. Rahman²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik,
Universitas Nasional

e-mail: moechsienahmad@gmail.com ¹; larisaputriar@gmail.com ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas aplikasi akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Di mana teknologi informasi berbasis internet yang banyak digunakan oleh masyarakat secara luas telah mendorong Aparatur Pemerintahan yang ada, baik pada tingkatan pusat hingga tingkatan daerah untuk mulai berbenah. Namun pengguna aplikasi di Kota Sukabumi tidak sebanding dengan jam kerja pegawai dalam mengelola aplikasi tersebut. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dua variabel yang berpengaruh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, termasuk pada tingkat hubungan yang kuat sebesar $R^2=77,8\%$, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel efektivitas ($Y=2,277+0,867X$) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept dari persamaan diatas mengandung pengertian bahwa pada

saat tingkat Efektivitas (X) sebesar 2,277 maka tingkat perolehan pada Kualitas Pelayanan (Y) adalah sebesar 0,867. Dari persamaan diatas juga dapat diketahui jika Efektivitas (X) naik, maka Kualitas Pelayanan (Y) akan naik sebesar 0,867.

Keywords: Efektivitas, Pelayanan, Layanan Kemboja Sari, Kualitas.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di kota yang terus berkembang dimulai dengan terjadinya proses urbanisasi dewasa ini. Maka, sejak saat itulah orang semakin banyak berpindah dari daerah daesa ke kota untuk mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, perumahan, transportasi dan penghidupan yang lebih baik (Petrolo, Loscri & Mitton, 2016; Saluky, 2017. Di tahun 2010 50% penduduk dunia yang tinggal di kota urban dan jika tidak dikendalikan diperkirakan pada tahun 2030 dapat mencapai 80% penduduk yang mendiami perkotaan. Oleh karena itu, sangat penting setiap perkotaan untuk sigap melayani jumlah warga urban yang besar ini dan menghadapi tantangan baru, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, pengelolaan limbah, dan sebagainya) (Wilson, 2012). Di konteks inilah, teknologi informasi dan komunikasi perlu digandeng bersama dengan pemerintah daerah dan perusahaan swasta, memainkan peran utama dalam menerapkan layanan, dan aplikasi inovatif untuk menjadikan kota cerdas (Wilson, 2012; Batty et al., 2012) Aplikasi inovati Layanan Kemboja Sari mulai diluncurkan ke publik pada akhir tahun 2019. Dalam pelaksanaanya Layanan Kemboja Sari didukung dengan sebuah aplikasi berbasis internet yang dapat diunduh di *google play*. Melalui Aplikasi Layanan Kemboja Sari masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian hanya dengan mengisi formulir yang tersedia serta mengunggah foto dokumen persyaratan yang diperlukan. Dokumen akta kematian akan diterbitkan paling lama dalam waktu satu hari kerja dan akan langsung diantarkan kerumah pemohon.

Aplikasi Layanan Kemboja Sari digunakan untuk mengurus penerbitan dokumen akta kematian. Melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengurus penerbitan dokumen akta kematian, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kendala untuk

datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Sukabumi. Keunggulan mengurus dokumen akta kematian melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari dibandingkan mengurus dokumen akta kematian secara langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Sukabumi diantaranya adalah perizinan dapat diproses secara elektronik (*online*), selain cepat dan mudah dalam permohonan penerbitan dokumen akta kematian, hal lain yang menjadi unggulan program Layanan Kemboja Sari yaitu dokumen yang telah selesai diterbitkan akan diantarkan langsung oleh petugas Disdukcapil Kota Sukabumi ke alamat pemohon. Selain itu dengan menggunakan aplikasi Layanan Kemboja Sari, pemohon akan mendapatkan tiga buah dokumen administrasi kependudukan yaitu akta kematian, kartu keluarga baru dan KTP-el bagi suami atau istri yang telah berubah status perkawinannya menjadi cerai mati. Data rekapitulasi pelayanan permohonan penerbitan Akta Kematian yang diurus secara langsung di kantor Disdukcapil Kota Sukabumi atau pelayanan secara manual yang kemudian digantikan dengan pelayanan permohonan penerbitan Akta Kematian secara online melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Sukabumi tahun 2020 (lihat tabel 1.1)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui jumlah pemohon penerbitan Akta Kematian yang menggunakan Aplikasi Layanan Kemboja Sari (*online*) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Juni 2020 memperoleh hasil sebanyak 1.129 pemohon. Akan tetapi dari data pemohon yang menggunakan aplikasi Layanan Kemboja Sari (*online*) tersebut yang sesuai dengan tujuan atau SOP aplikasi hanya sebanyak 410 pemohon yang pengajuan dokumen dapat selesai dalam satu hari, sebanyak 351 masih diluar target pencapaian tujuan aplikasi tersebut yaitu satu hari jadi dikarenakan tidak adanya menu informasi pada aplikasi Layanan Kemboja Sari untuk mengetahui jangka waktu dokumen yang diajukan dapat selesai dan sebanyak 368 dokumen Akta Kematian yang diajukan oleh pemohon.

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Penerbitan Akta Kematian
DISDUKCAPIL Kota Sukabumi
Bulan Oktober 2019 – Juni 2020

Kecamatan	Aplikasi Layanan Kemboja Sari				
	Jumlah Meninggal	Memiliki Akta	%	Belum Memiliki Akta	%
Gnung Puyuh	210	202	96,19	8	3,81
Cikals	189	183	96,83	6	3,17
Citanduyung	144	127	88,19	17	11,81
Wandoyong	199	196	98,49	3	1,51
Berus	151	147	97,35	4	2,65
Leribungta	123	121	98,37	2	1,63
Cibener	169	153	90,53	16	9,47
Jumlah	1.185	1.129	95,27	56	4,73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, 2019-2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan smartphone pada pemohon akta kematian periode Oktober 2019-Desember 2019 masih mencapai 31,75%. Tidak adanya sarana yang menunjang untuk mengakses Aplikasi Layanan Kemboja Sari tentu akan menghambat kepemilikan akta kematian yang diperoleh dengan pengajuan secara online. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait pelayanan permohonan penerbitan Akta Kematian melalui Aplikasi Layanan Kemboja Sari yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Permasalahan pertama berkaitan dengan kurangnya pembaharuan (update) atas informasi berkenaan dengan posisi berkas pada tiap tahun dan bulannya. Pada aplikasi Layanan Kemboja Sari tidak tercantum menu informasi bagi pengguna yang mengajukan pembuatan dokumen Akta Kematian di Aplikasi Layanan Kemboja Sari. Permasalahan kedua terkait batas waktu penyelesaian penerbitan dokumen Akta Kematian yang diajukan melalui Aplikasi Layanan Kemboja Sari seharusnya dapat selesai dalam jangka waktu satu hari kerja.

Namun menurut salah satu pemohon dokumen Akta Kematian yang menggunakan Aplikasi Layanan Kemboja Sari, dokumen Akta Kematian selesai dalam jangka waktu 3-5 hari kerja. Permasalahan ketiga yaitu dokumen Akta Kematian yang diajukan oleh pemohon pengguna Aplikasi Layanan Kemboja Sari sesuai dengan peraturan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, 2020.10 berlaku setelah status data selesai dokumen Akta Kematian beserta Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el baru langsung diantarkan oleh petugas Disdukcapil Kota Sukabumi ke alamat pemohon. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pemohon pengguna Aplikasi Layanan Kemboja Sari masih harus mengambil dokumen Akta Kematian secara langsung ke kantor Disdukcapil Kota Sukabumi. Sementara itu berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 batas penerbitan dokumen akta kematian paling lambat 3 hari dari pengajuan permohonan dokumen. Permasalahan keempat terkait aksesibilitas Aplikasi Layanan Kemboja Sari yang terkadang sulit diakses oleh pemohon karena mengalami gangguan. Seperti yang dikeluhkan oleh beberapa pemohon di ulasan Aplikasi Layanan Kemboja Sari pada platform Google Play Store, mereka mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi seperti aplikasi sering mengalami gangguan (error). Permasalahan kelima yaitu Aplikasi Layanan Kemboja Sari hanya terbatas untuk mengajukan permohonan akta kematian saja. Selain itu aplikasi ini tidak terintegrasi pada dokumen kependudukan lainnya, yakni pemohon akta kematian tidak bisa secara sekaligus menghapus orang yang telah meninggal pada kartu keluarganya.

Literature review

Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas menjadi unsur utama yang menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi. Pencapaian tujuan dari suatu organisasi menggambarkan rencana kerja organisasi yang dilaksanakan oleh anggota organisasi tersebut melalui kegiatan-kegiatan tertentu sehingga rencana kerja yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Kata efektif sering dikaitkan dengan kata efisien, efisien lebih mengarah kepada pemanfaatan waktu dan sumberdaya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan, Sedangkan

efektif lebih mengacu pada tujuan dan sasaran organisasi, sehingga sesuatu yang efisien belum tentu efektif. Mengukur efektivitas organisasi dalam melaksanakan program kerja bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Steers pengukuran efektivitas dinilai dari sejauhmana organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Adapun pengukuran efektivitas menurut Steers digolongkan menjadi 3 (tiga) model, yaitu: 1) Model optimalisasi tujuan, ukuran sejauhmana tujuan berhasil dicapai secara maksimal. Jadi efektivitas dinilai dari seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya; 2) Perspektif sistem, tujuan tidak diberlakukan sebagai keadaan akhir yang statis melainkan sebagai sesuatu yang dinamis seiring perkembangan waktu. Jadi tujuan mengikuti alur dalam organisasi perspektif sistem; dan 3) Tekanan perhatian pada perilaku manusia, yaitu mengintegrasikan tingkat mikro dan makro dari hasil analisis kita seta meneliti bagaimana perilaku individu dan kelompok dalam memperoleh atau menghambat tujuan suatu organisasi.

Kuallitas Pelayanan Publik dalam lingkup e-Government

Pada era globalisasi, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi Negara yang teribatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan

publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan walaupun hasilnya tidak terikat pada satu produk secara fisik (Pasolong, 2017; Sinambela, 2014). Perkembangan teknologi informasi berbasis internet telah banyak digunakan oleh masyarakat secara luas dan mendorong Aparatur Pemerintahan yang ada, baik pada tingkatan pusat hingga tingkatan daerah untuk memanfaatkan keberadaan teknologi tersebut dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan peraturan- peraturan yang berlaku.

Pelayanan publik dengan memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi dan informasi telah digalakkan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan efisiensi pelayanan publik yang disebut dengan Electronics Government (E-government). E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari pemerintah. Teknologi yang digunakan dapat melayani berbagai pelayanan kepada publik secara cepat dan dengan cakupan yang lebih luas. Dari kemudahan fasilitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat kepada layanan pemerintah, misalnya melalui forum diskusi secara online. G2C (Government to Citizen), merupakan kategori e-gov yang meliputi semua interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui, serta mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada warga negara. Artinya jika infrastruktur dan tingkat pendidikan masyarakat telah maju, maka G2C akan sangat mempermudah urusan kenegaraan. Di dalam kategori ini menangani masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas seputar dokumen Akta Kematian, baik bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi mengenai berita terkait. Untuk itu peran media elektronik sangat dibutuhkan di dalam menunjang keberhasilan e-government yang tepat sasaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, sehingga warga Kota Sukabumi dapat lebih mudah untuk mencari informasi dan membuat Akta Kematian. Tujuan yang dicapai dari proses pelayanan

ini adalah untuk membentuk karakter pegawai dan aparatur yang menjadi lebih berkualitas, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam proses pembuatan dokumen kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kematian.

Method

Metode penelitian kuantitatif deskriptif biasanya didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan (Sugiyono, 2016; Moleong, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: a) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi; b) Kuesioner/Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya; dan c) Telaah pustaka dan dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang bersifat teoritis seperti buku, dokumen, berbagai macam literatur yang berhubungan dengan teori efektivitas.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan anggota populasi tersebut Sugiyono. Alasan peneliti menggunakan teknik simple random sampling karena orang yang meninggal tidak memiliki strata atau tingkatan anggota populasi. Untuk mengetahui jumlah kelayakan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

N = jumlah sampel

n = jumlah populasi

d = presiasi yang digunakan 10% atau 0,1.

$$n = \frac{1.129}{1.129 \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$= \frac{1.129}{12,29}$$

$$= 91,86 \text{ maka dibulatkan menjadi } 92.$$

Berdasarkan perhitungan kelayakan sampel tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 92 pemohon yang sudah mengurus akta kematian secara online melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari (Tahun 2019-2020). Adapun untuk uji hiopotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat hubungan efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) terhadap kualitas pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

H1 : Terdapat hubungan efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) terhadap kualitas pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

Hasil dan Pembahasan

Uji validitas menurut Sugiyono menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan efek peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Uji validitas menggunakan metode korelasi *pearson product moment*. Menyatakan item pertanyaan dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan begitupula sebaliknya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun untuk uji reliabilitas merupakan pengujian ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil relatif yang sama. Uji reabilitas menggunakan metode *Cronbach Alpha*, jika nilai *Cronbach alpha* > r_{tabel} sebesar 0,7 maka instrumen dikatakan reliabel, handal atau konsisten. Mengacu pendapat Riduan (2015) menjelaskan bahwa “Korelasi ganda (multiple correlate) adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

- rx_y = koefisien korelasi antara X dan Y
- X = skor item
- Y = skor total
- ∑X = Jumlah skor butir
- ∑Y = Jumlah skor total
- ∑X² = Jumlah kuadrat butir
- ∑Y² = Jumlah kuadrat total
- ∑XY = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total
- n = Jumlah Responden

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) terhadap kualitas pelayanan Di Dinas Y = a + bX Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Menurut (Suharyadi & Purwanto, 2016) untuk menentukan nilai t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- t : harga t hitung
- r : koefisien korelasi yang ditemukan
- n : banyaknya sampel
- 1 : ketentuan
- 2 : ketentuan

Daerah keputusan untuk menerima H0 atau menerima H1 memutuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika t hitung > t tabel maka H1 diterima
2. Jika t hitung < t tabel maka H1 ditolak

Analisis Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu pemohon yang sudah mengurus akta kematian secara online melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari yang berjumlah 92 responden. Berdasarkan kuisisioner yang telah disebar oleh peneliti maka indentitas responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	42	45,7
2	Perempuan	50	54,3
	Total	92	100

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Diagram 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Tabel 4.2

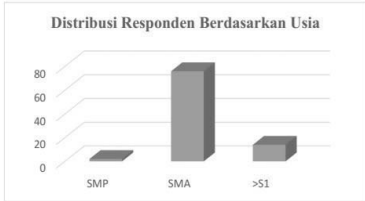
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah responden	Persentase (%)
1	21 tahun – 30 tahun	40	43,5
2	31 tahun – 40 tahun	21	22,8
3	41 tahun – 50 tahun	22	23,9
4	>51 tahun	9	9,8
	Total	92	100

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Diagram 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang sudah mengurus akta kematian secara online melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50 dengan persentase 54,3% lebih banyak daripada responden yang berjenis kelamin laki laki yang hanya menghasilkan responden sebanyak 42 dengan persentase 45,7%. Dan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 92 responden sebanyak 43,5% atau 40 responden berusia 21 sampai 30 tahun, sebanyak 22,8% atau 21 responden berusia 31 sampai 40 tahun, dan sebanyak 23,9% atau 22 responden berusia 41 sampai 50 tahun serta 9,8% atau 9 responden responden berusia lebih dari 51 tahun. Sehingga dari hasil tersebut dapat diberikan keterangan bahwa sebagian besar responden dari pemohon yang sudah mengurus akta kematian secara online melalui aplikasi Layanan Kemboja Sari yakni berusia 21 sampai 30 tahun.

Uji Realibilitas Instrumen menggunakan Cronbach alpha hasil perhitungan uji reabilitas variabel variabel r hitung r_{kritis} Validitas efektivitas sebesar 0,979. Sedangkan reliabilitas variabel kualitas sebesar 0,971. Dimana pada skor tersebut berada diatas r kritis 0,70 sehingga dapat dinyatakan reliabel yang artinya bahwa instrument yang terdapat pada variabel efektivitas dapat digunakan untuk pengukuran analisis data. Secara keseluruhan skor untuk masing-masing item pernyataan pada variabel efektivitas dapat di gambarkan pada tabel dibawah ini:

Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengkaji hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. maka dalam uji koefisien regresi efektivitas aplikasi layanan akta kematian jemput bola jadi dalam satu hari (layanan kemboja sari) terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1

Hasil Uji Hipotesis Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) Terhadap Kualitas Pelayanan Kota Sukabumi

Coefficients^a

Model				Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.277	3.901		0.584	0.561
	Efektivitas	0.867	0.049	0.882	17.754	0.000

Berdasarkan pada hasil analisis koefisien regresi sederhana pada tabel diatas, maka model persamaan regresi linear sederhana efektivitas (X) terhadap kualitas pelayanan (Y) yaitu: $Y = 2,277 + 0,867 X$

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2

Hasil Koefisien Regresi dan Uji Signifikan Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) Terhadap Kualitas Pelayanan Kota Sukabumi

Coefficients^a

Model				Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.277	3.901		0.584	0.561
	Efektivitas	0.867	0.049	0.882	17.754	0.000

Berdasarkan table hasil uji diatas, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk uji hipotesis sebesar 17,754. Nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang dapat dipeoleh melalui hitungan statistik dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel dengan rumus =TINV(0.05,90) yang menghasilkan angka 1,986 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $17,754 > 1,995$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 yang artinya bahwa terdapat hubungan efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) terhadap kualitas pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

Tabel 3

Data Hasil Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) Terhadap Kualitas Pelayanan Kota Sukabumi

Pernyataan Analisis	Keputusan / Hasil
Anggota Populasi	N = 92
Koefisien Korelasi kedua Variabel	0,882
Interpretasi Koefisien Korelasi	Sangat Kuat
Koefisien Determinasi	77,8%
Analisis Regresi	$Y = 2,277 + 0,867 X$

Sumber : data hasil Penelitian 2020

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah anggota populasi sebesar 92 responden, diperoleh hasil koefisien korelasi kedua variabel yang diperoleh angka R sebesar 0,882 hasil ini berada pada kategori 0,80 – 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara efektivitas dan kualitas pelayanan. Hasil koefisien determinasi menunjukkan besarnya nilai adjusted R2 yaitu 77,8%; maka hal ini menunjukkan 77,8% variabel kualitas pelayanan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu efektivitas. Sementara

22,2% berasal dari faktor yang tidak diteliti dalam penelitian. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien konstanta $Y = 2,277$ bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel Efektivitas (X) atau variabel tersebut dinyatakan nilainya 0, maka Kualitas Pelayanan (Y) mengalami kenaikan sebesar 2,277. Koefisien $X = 0,867$ bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsi ketiadaan variabel independen lainnya maka apabila Efektivitas ditingkatkan 1 satuan, maka Kualitas Pelayanan. (Y) akan naik sebesar 0,867. Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept dari persamaan diatas mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat Efektivitas (X) sebesar 2,277 maka tingkat perolehan pada Kualitas Pelayanan (Y) adalah sebesar 0,867. Dari persamaan diatas juga dapat diketahui jika Efektivitas (X) naik, maka Kualitas Pelayanan (Y) akan naik sebesar 0,867.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori tinggi, yang berarti Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dapat dikatakan baik. Dimensi yang memberikan kontribusi terbesar pada variabel efektivitas adalah dimensi pencapaian tujuan dan dimensi yang memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi integrasi. Sedangkan untuk skor indikator tertinggi pada variabel efektivitas yaitu permohonan akta kematian melalui Aplikasi Layanan Kemboja Sari dapat dilakukan selama 24 jam.
2. Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi termasuk dalam kategori yang tinggi, yang berarti kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dapat dikatakan baik. Dimensi yang memberikan kontribusi terbesar pada variabel kualitas pelayanan

adalah dimensi Tangible dan dimensi yang memberikan kontribusi terkecil adalah dimensi Emphaty. Sementara skor indikator tertinggi pada variabel kualitas pelayanan terdapat pada indikator Aplikasi Layanan Kemboja Sari Lebih mudah dalam proses pelayanan.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Efektivitas Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari (Layanan Kemboja Sari) Terhadap Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, termasuk pada tingkat hubungan yang kuat, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel efektivitas berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi

Daftar Pustaka

Aisyah, I. N. T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2019). "Transforming Governance " di Kota Yogyakarta. *International Journal of Demos*, 1(3), pp.290–306

Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., & Bazzani, A. (2012), "Smart Cities of the future," *Europh. Physic. Journal*, vol. 518, pp. 481–518.

Cordella, A., & Hesse, J. (2015). E-government in the making: An actor network perspective. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 9(1), pp.104–125

Darwin, M. (2014). the Government of Yogyakarta City. *Journal of Government and Politics* Vol.5 No.1 February 2014, 5(1).

Gumilar, M. G. (2019). INOVASI PEMERINTAH DAERAH JOGJA SMART SERVICE DALAM MENCIPTAKAN SMART AND LIVEABLE CITY DI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Gama Societa*, 3(1), pp.19–27

- Handayaningsih, S., & Nugroho, H. (2013). MODEL SISTEM M-GOVERNMENT (Studi Kasus : Pemerintah Kota Yogyakarta). *Jurnal Informatika Ahmad Dahlan*, 7(2), 811–825. <https://doi.org/10.26555/jifo.v7i2.a2767>
- Hatsu, S., & Ngassam, E.K. (2017), An Integrated Framework for Benchmarking e-Government Projects, *Conferences Proceeding of Paul Cunningham Miriam Cunningham IIMC International Infiltrate Managing Corporation*, pp. 1–9.
- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service Oleh : Erick S. Holle. *Sasi*, 17(3), pp.21–30
- Indrajit, R.E. (2012), *Electronic Government : Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(3), pp. 229–236
- Silalahi, U. 2017. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2017), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Petrolo, R., Loscri, V, & Mitton, N. (2016), Cyber-Physical Objects as Key Elements for a Smart Cyber-City, *Manag. Cyber Phys. Objects Futur. Internet Things*, pp. 31–49.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia. *Jeam*, XI(1), pp.1–19

Saluky, S. (2017), Development of Enterprise Architecture Model for Smart City,” ITEJ (Information Technol.Eng. Journals), vol. 2, no. 2.

Siddiquee, N. A. (2016). E-government and transformation of service delivery in developing countries: The Bangladesh experience and lessons. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 10(3), 368–390. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2015-0039>

Wilson, M. (2012), “By 2050, 70% Of The World’s Population Will Be Urban. Is That A Good Thing?,” *Fast Company*, 2012. [Online]. Available: <https://www.fastcodesign.com/1669244/by-2050-70-of-the-worlds-population-will-be-urban-is-that-a-good-thing>

RIWAYAT PENYUNTING



Prof. Dr. Andriansyah., M.Si,

Prof. Dr. Andriansyah., M.Si., lahir di Jakarta pada 01 Oktober 1971. Andriansyah menempuh pendidikan S-1 dan S-3 di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan pendidikan S-3 dijalaninya di Universitas Padjadjaran Bandung.

Di samping sebagai dosen tetap dan menduduki jabatan struktural di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), seperti sebagai kasubag kemahasiswaan, ketua program studi ilmu administrasi negara dan Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Sekarang Andriansyah menjabat Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan periode kedua sampai dengan tahun 2025, hingga akhirnya saat ini menjadi Guru Besar Bidang/Profesor Ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



Dr. Taufiqurokhman, A.Ks., S.Sos., M.Si

Dr. Taufiqurokhman, A.Ks., S.Sos., M.Si., saat ini diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode 2017-2021.

Taufik menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Padjajaran, Bandung dan berhasil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan tahun 2005. Tahun 2015, Taufik melanjutkan pendidikan S3 (Doktoral) di Universitas Padjajaran Bandung untuk mendapatkan gelarnya di bidang ilmu pemerintahan dengan Judul Disertasi: Implementasi Indeks Pendidikan Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang).



Dr. Ismail Suardi Wekke, Ph.D

Dr. Ismail Suardi Wekke, Ph.D., dilahirkan di Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 10 Januari 1977. Jebolan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang 1999, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang 2002, dan Universiti Kebangsaan Malaysia 2009 ini memang sangat mencintai dunia pendidikan.

Selain mengajar di beberapa perguruan tinggi di beberapa kota di Indonesia, Ismail Suardi Wekke juga pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Eastern Federal University, Rusia (2012), Hong Kong University, China (2013), Universida de Macau, China (2014), dan di Linkoping University, Swedia (2015).

Tak hanya itu, Ismail Suardi Wekke juga pernah menjadi dosen tamu di Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia (Sejak 2015), Kolej Yayasan Pahang, Malaysia (sejak 2015), Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia (2016), dan Dalat University, Vietnam (2017).

